

CELIOS

Refleksi Bencana dan Dampaknya terhadap Perekonomian

Nailul Huda
Direktur Ekonomi Digital
Center of Economic and Law Studies



Dipresentasikan dalam AIPI

Jakarta
06 Juli 2026

Key Takeaways

- ❑ **Pertumbuhan Ekonomi Kian Berat** — Pendapatan disposibel terus menurun terhadap GNP; GNI per kapita Indonesia tertinggal dari negara tetangga
- ❑ **Ketimpangan & Kemiskinan Memburuk** — Kemiskinan stagnan, ketimpangan di kota lebih parah dari desa; ketimpangan lahan sangat parah
- ❑ **Sektor Tambang Merugikan Desa** — Desa tambang sulit akses pendidikan & kesehatan; 1 dari 2 desa tambang mengalami banjir
- ❑ **Bencana Menggerus Ekonomi Nasional** — Kerugian nasional akibat banjir Rp68,67 triliun (0,29% PDB), melebihi penerimaan tambang Rp16,6 triliun
- ❑ **Degradasi Lingkungan & Diversifikasi Rendah** — Indeks diversifikasi ekonomi rendah (98,7); deforestasi dan konversi lahan sawah ke sawit berlanjut
- ❑ **Konflik Agraria Terus Meningkat** — 295 kasus di 2024, 1,1 juta ha terdampak; kerugian besar bagi masyarakat dan perusahaan

Outline Pembahasan

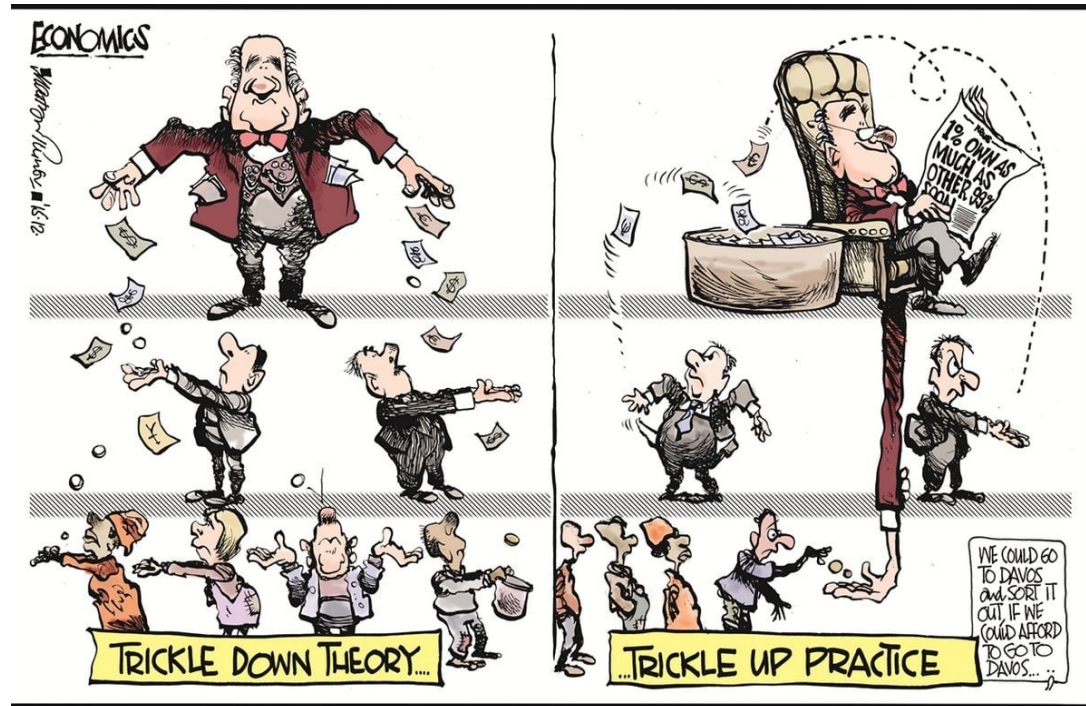
Konsep
Pembangunan
Ekonomi Modern

Kondisi Sosial
dan Ketimpangan
Memburuk

Penghijauan
Ekonomi

Konsep Pembangunan Ekonomi Modern

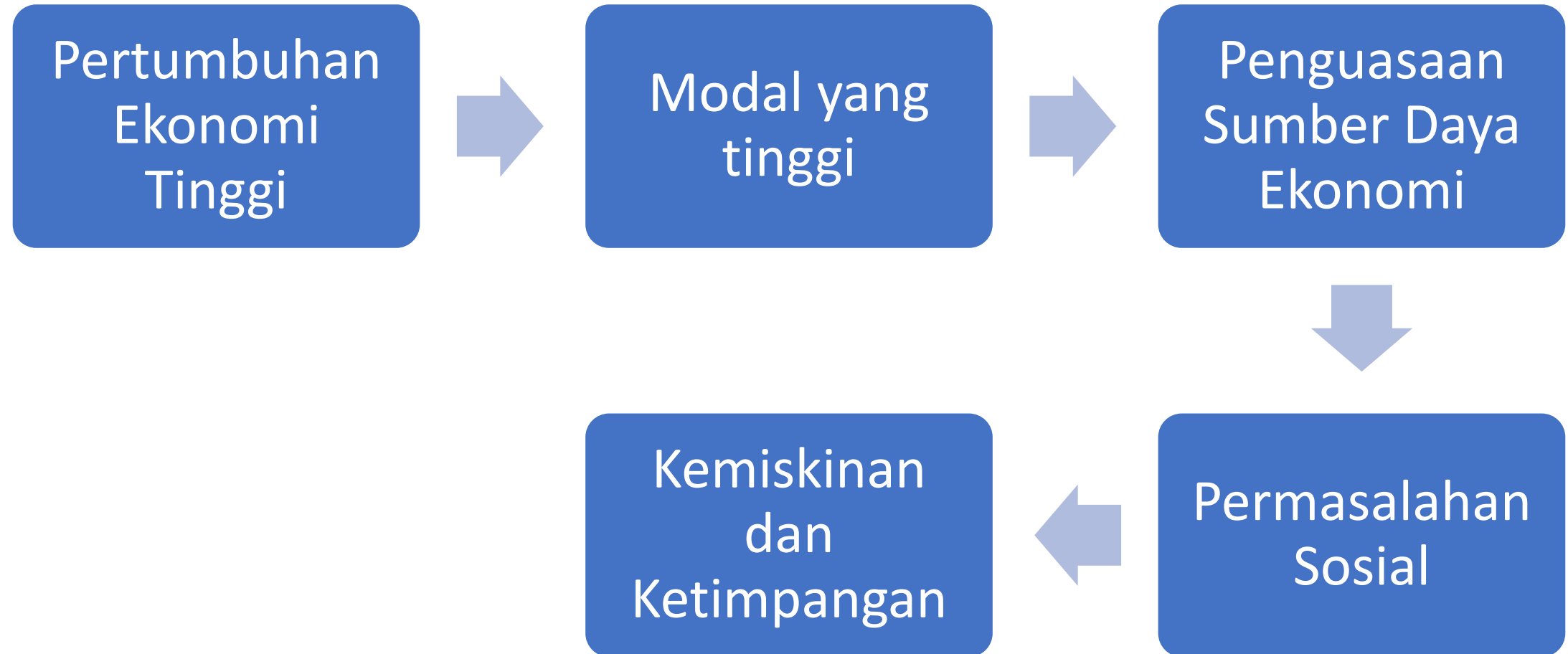
Konsep Awal Pembangunan Ekonomi



- Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi diharapkan membawa pengaruh positif ke beberapa aspek kehidupan (trickle down effect)
- Namun kenyataannya sering kali, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir kalangan

Sumber : <https://www.marketing91.com/trickle-down-theory/>

Konsep Awal Pembangunan Ekonomi



Fokus Awal: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
Harrod-Domar: Pembentukan Modal
Arthur Lewis: Industrialisasi

Kritik Dampak Sosial: Ketimpangan & Masalah Sosial
Meier & Baldwin: Pertumbuhan $\neq$ Kesejahteraan
Hirschman: Masukkan Unsur Sosial dalam Pembangunan

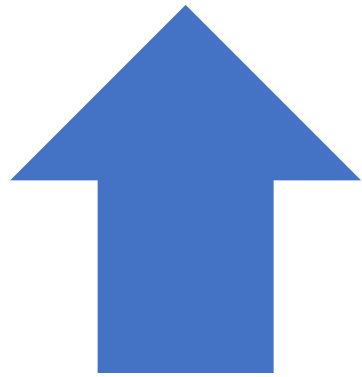
Pergeseran Konsep: Pembangunan yang Lebih Berkeadilan
Dudley Seers: Fokus pada Kemiskinan, Pengangguran, Kesenjangan
Meier: Pertumbuhan harus adil & tidak tambah kemiskinan

Pembangunan sebagai Peningkatan Kualitas Hidup
Sjahrir: Pertumbuhan $\neq$ Solusi Masalah Sosial
Amartya Sen: Fokus pada Pendapatan, Pendidikan, Kesehatan

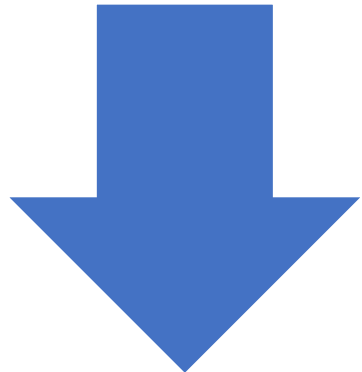
Perubahan Paradigma Pembangunan Ekonomi

Analisis Ekonomi

Definisi



Kebutuhan
Manusia selalu
meningkat



Sumber Daya
terbatas

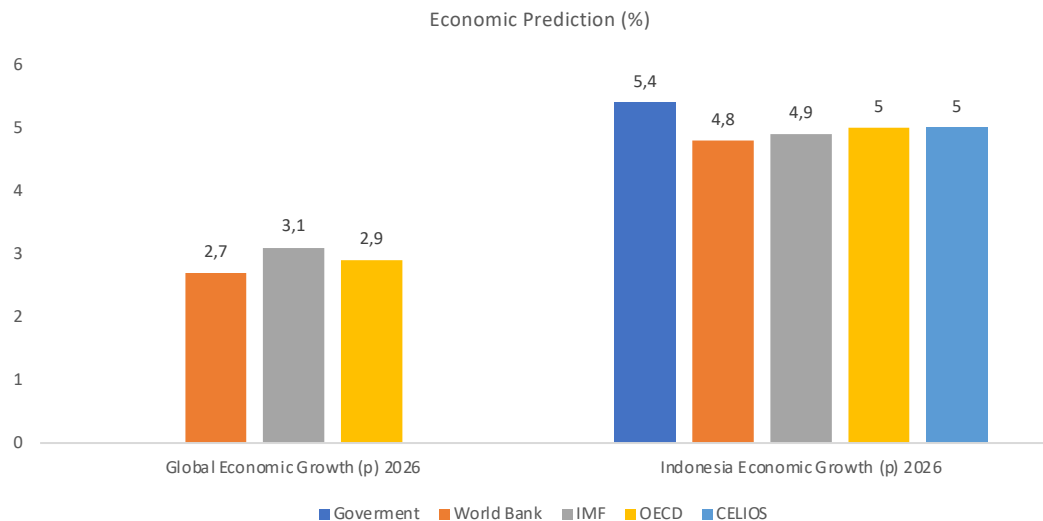
Tujuan

- Identifikasi tren ekonomi
- Evaluasi kebijakan ekonomi
- Rekomendasi kebijakan
- Efisiensi dan kesejahteraan

Analisis Dasar Kebijakan Publik

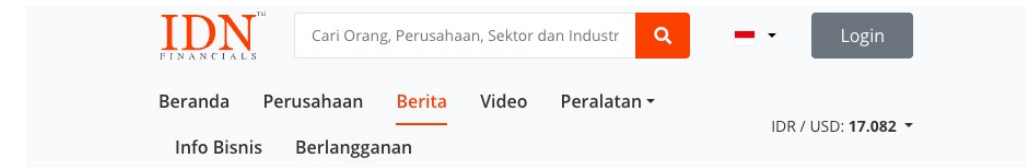


Pertumbuhan Ekonomi Kian Berat



Sumber: Beberapa Laporan, 2026

- Prediksi di Tahun depan juga masih berat untuk bisa tumbuh seperti yang ditargetkan dalam APBN 2026
- Terlebih ada gejolak ekonomi global seperti perang tarif Trump dan juga geopolitik
- Bahkan terbaru, Bank Dunia menurunkan proyeksinya menjadi 4,7 persen



Purbaya: Bank Dunia salah hitung, dosa besar ke RI



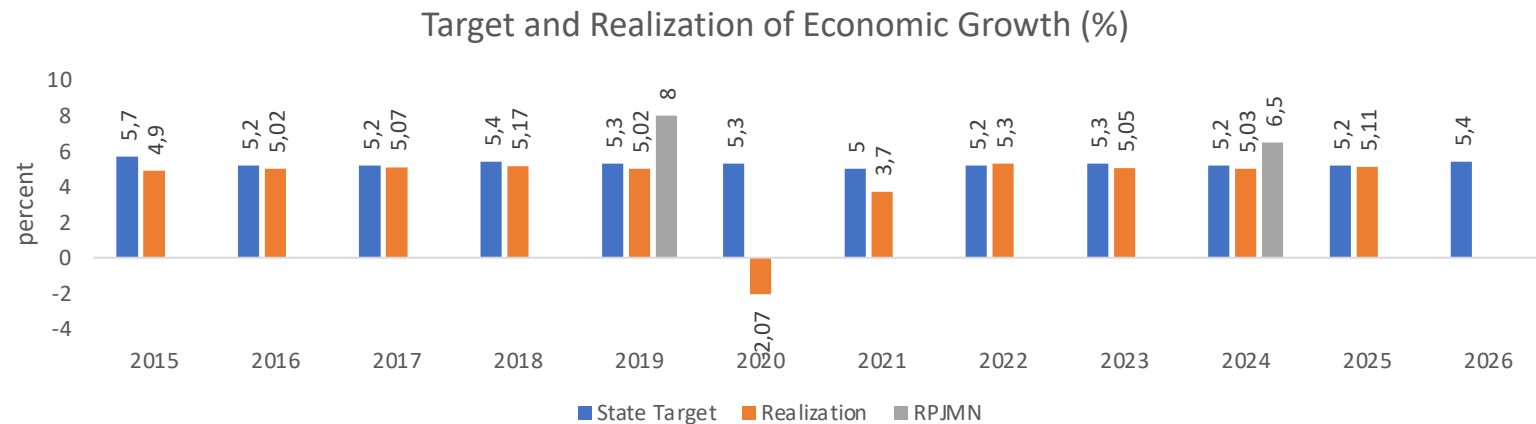
Kholid Rafsanjani, Zetta Hannany
10 April 2026 pukul 11.06

Google News

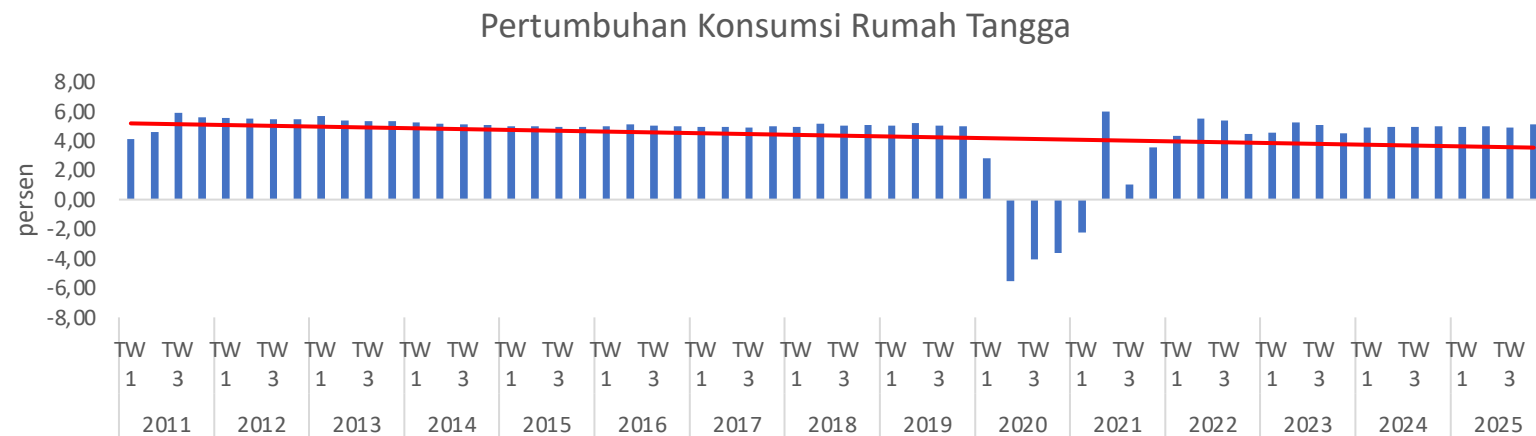


Purbaya nilai langkah Bank Dunia merevisi pertumbuhan RI tak akurat sebab harga minyak telah pulih.

Pertumbuhan Ekonomi Kian Berat

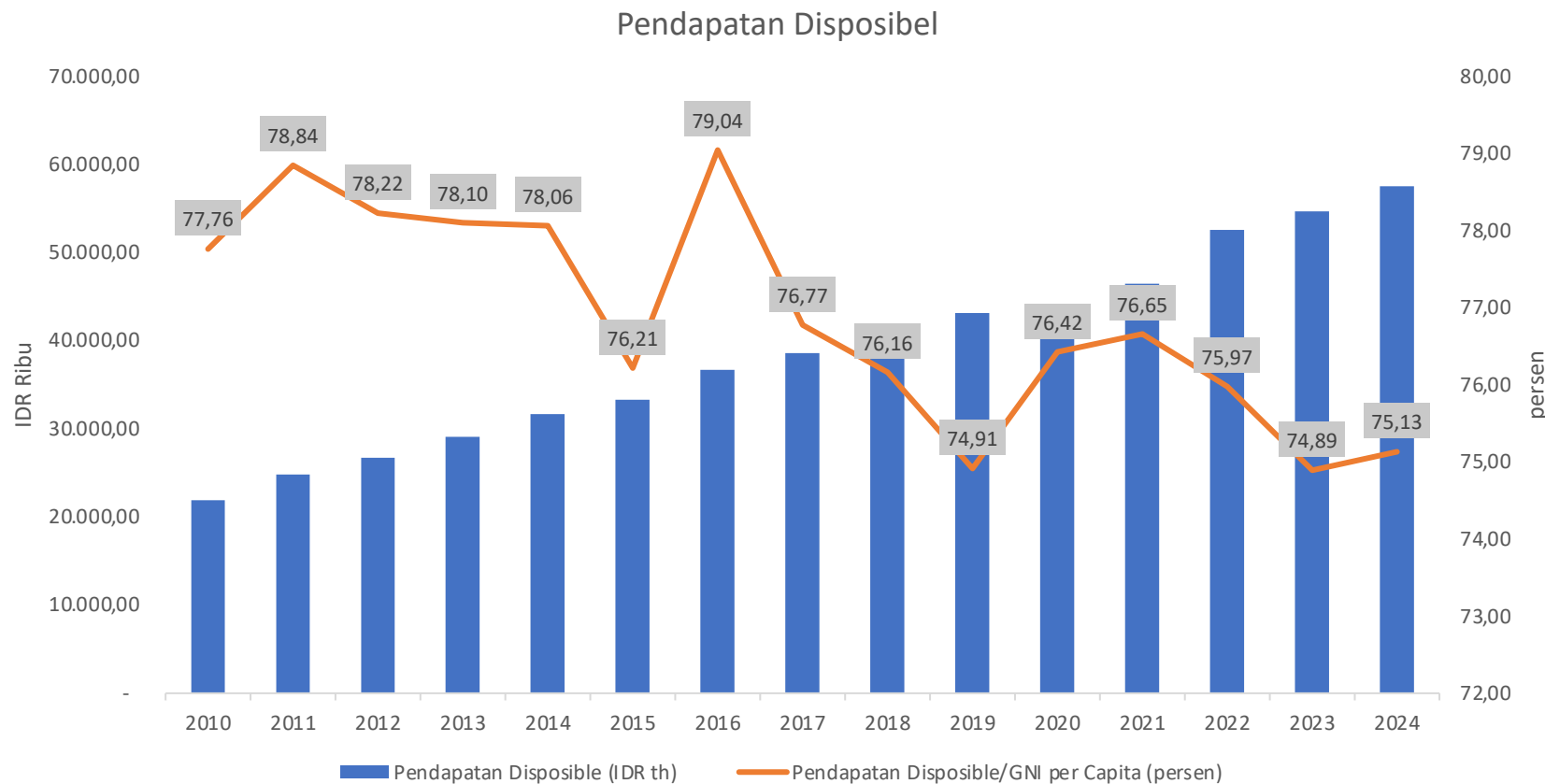


- Pertumbuhan ekonomi pada 10 tahun terakhir tidak pernah mencapai target RPJMN
- Hanya di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai target APBN



- Pertumbuhan ekonomi sangat fluktuatif dalam kurun waktu 2011-2023
- Di tahun 2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa terdorong lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi

Pendapatan Disposibel terus menurun secara rasio terhadap GNP

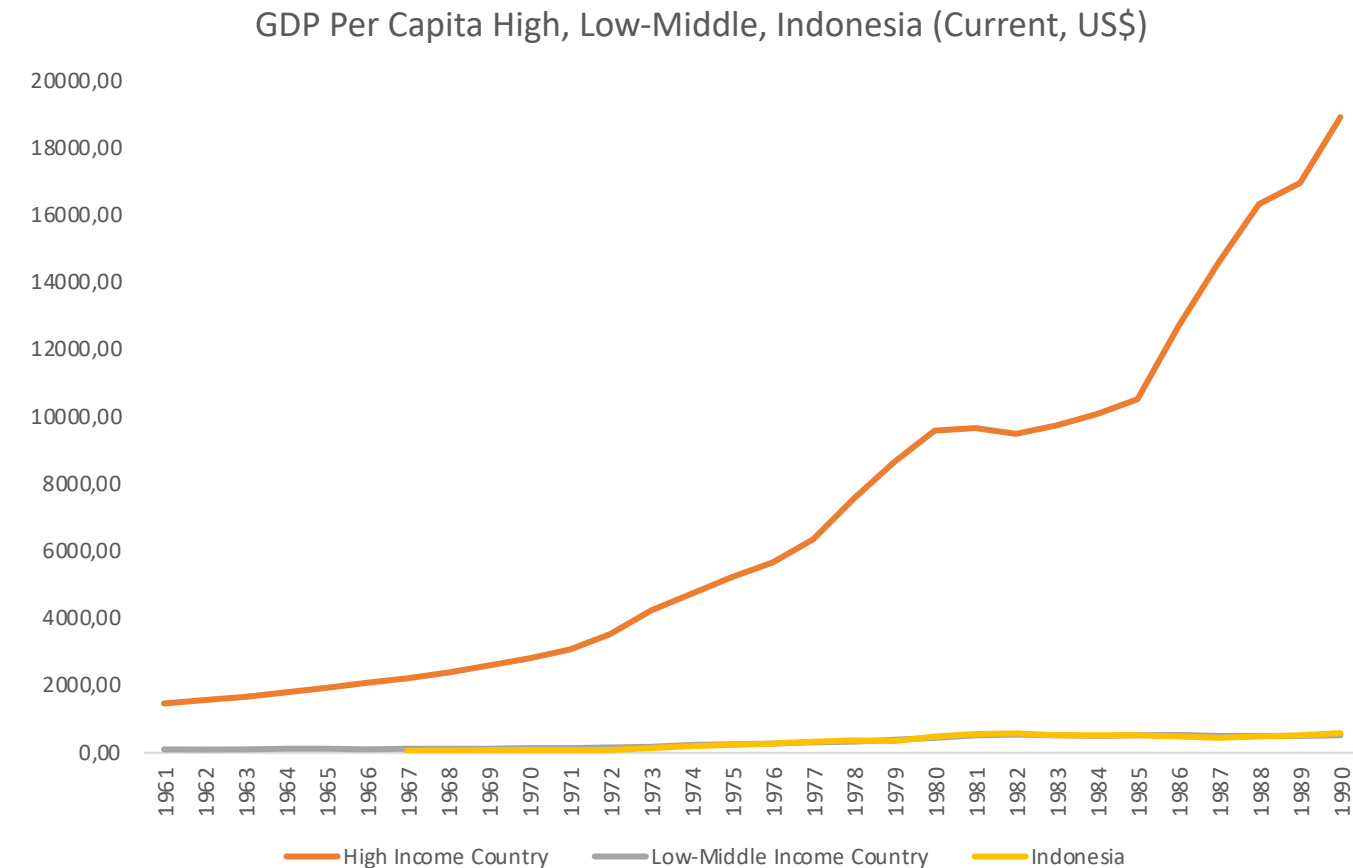


- Pendapatan masyarakat yang dapat dibelanjakan mengalami penyusutan meskipun pada tahun 2024 mengalami peningkatan tipis
- Akibat semakin banyak potongan pajak ataupun iuran

Sumber : CEIC, BPS, 2025

Negara Maju semakin Digdaya

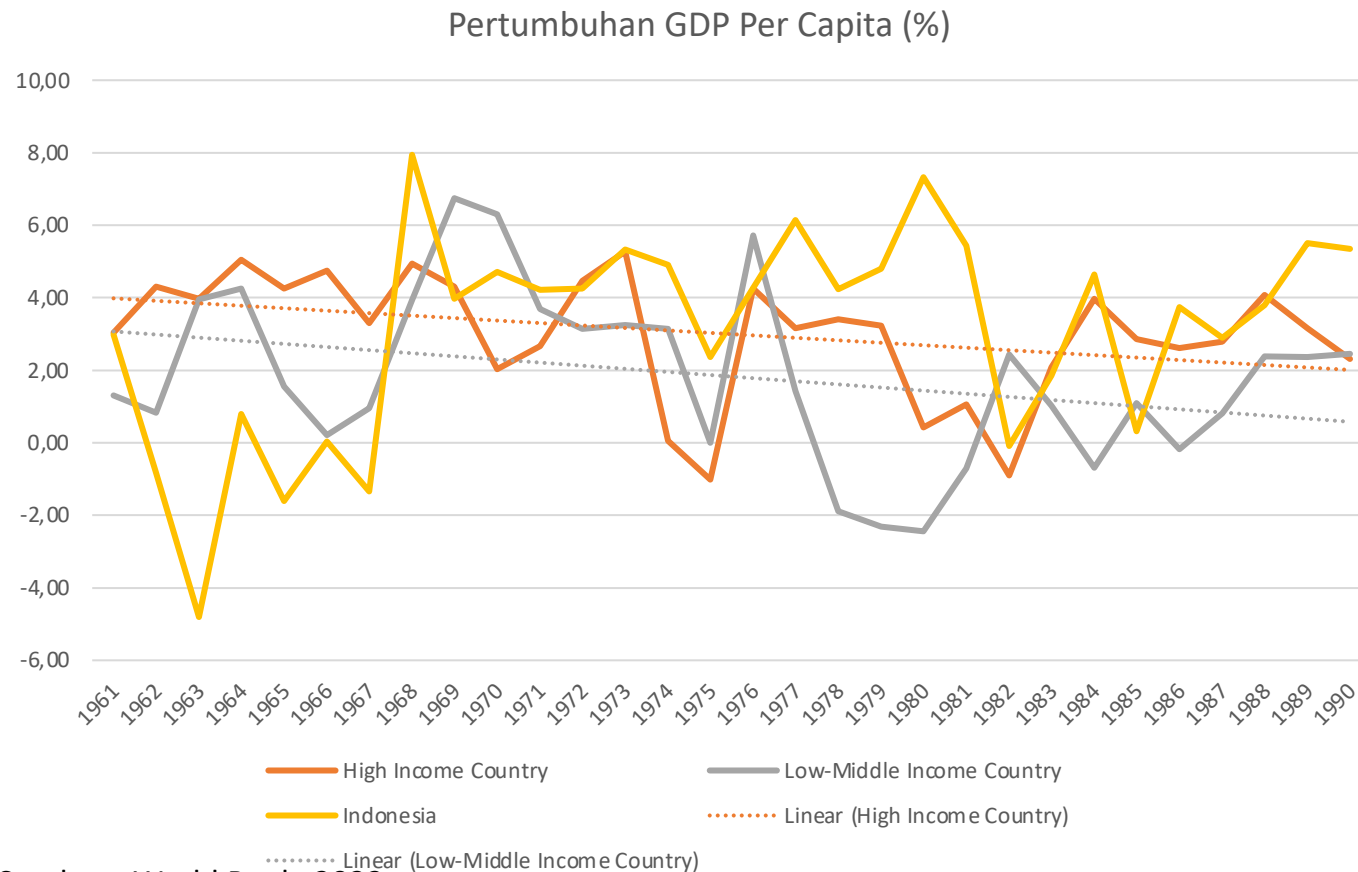
- Jurang pendapatan penduduk di negara maju dan berkembang semakin tinggi



Sumber : World Bank, 2022

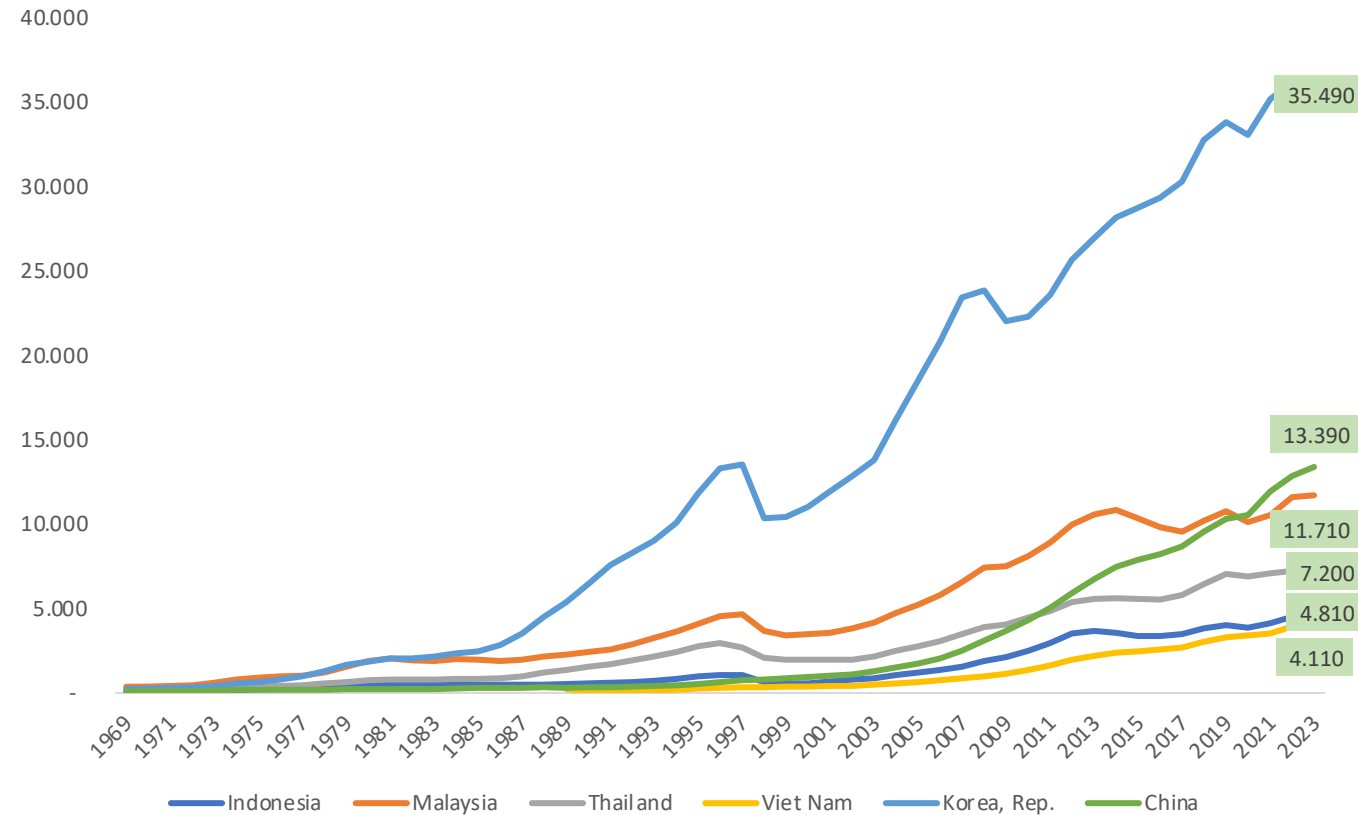
GDP Per Capita Negara ketiga Semakin Terpuruk

- Pertumbuhan GDP Per Capita untuk Lower Middle Income Country lebih cepat penurunannya (trend)



Sumber : World Bank, 2022

Gross National Income Indonesia tertinggal

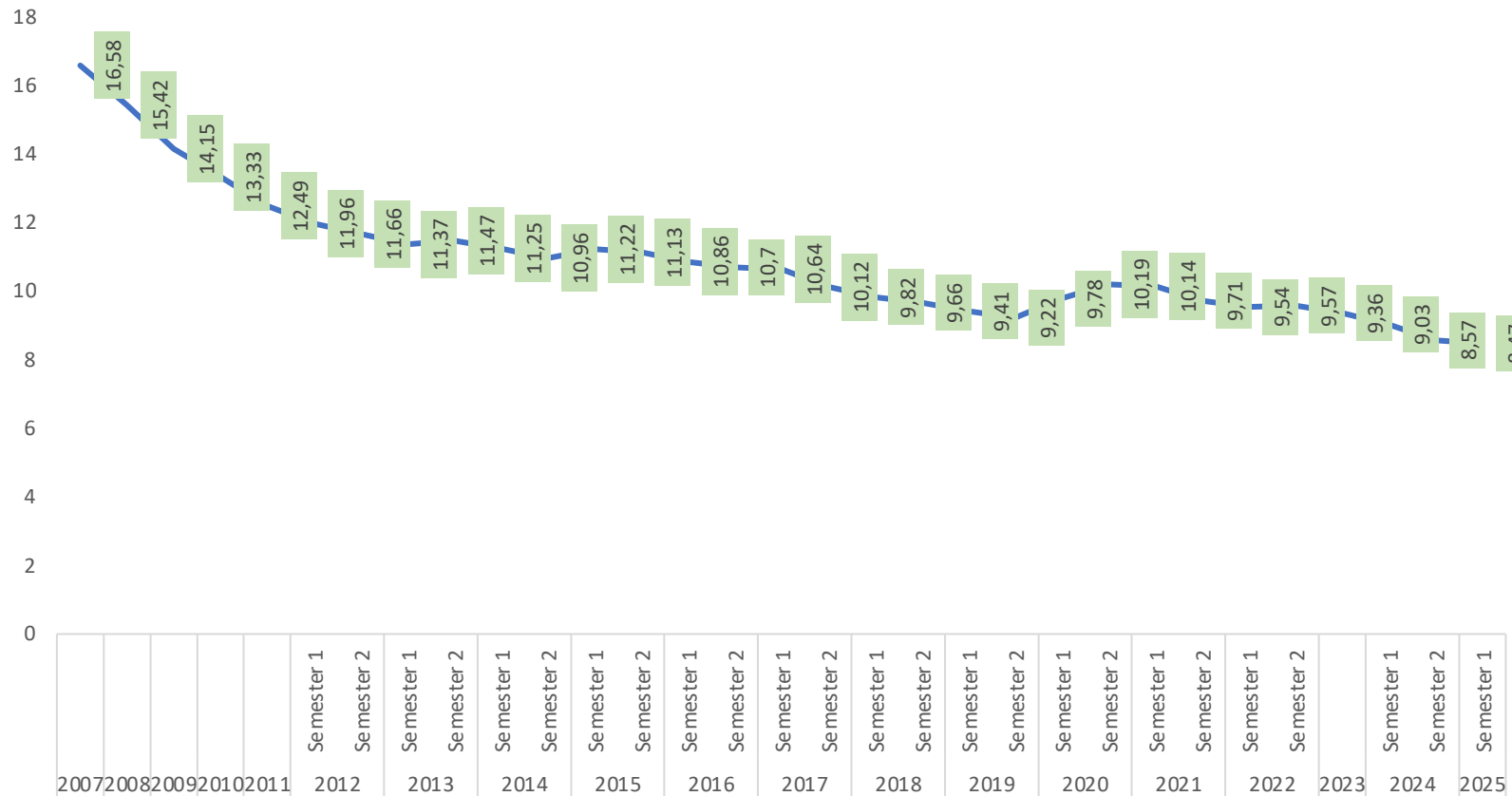


- Salah satu indikator yang bisa dilihat apakah perekonomian bisa menghasilkan trickle down effect, indikator yang bisa dilihat adalah GNI per Capita dimana sangat terlihat GNI per Capita Indonesia masih jauh dibandingkan negara-negara maju lainnya
- GNI per capita Indonesia hanya berada di angka USD4,810

Sumber : World Bank Database, 2023

Kondisi Sosial dan Ketimpangan Memburuk

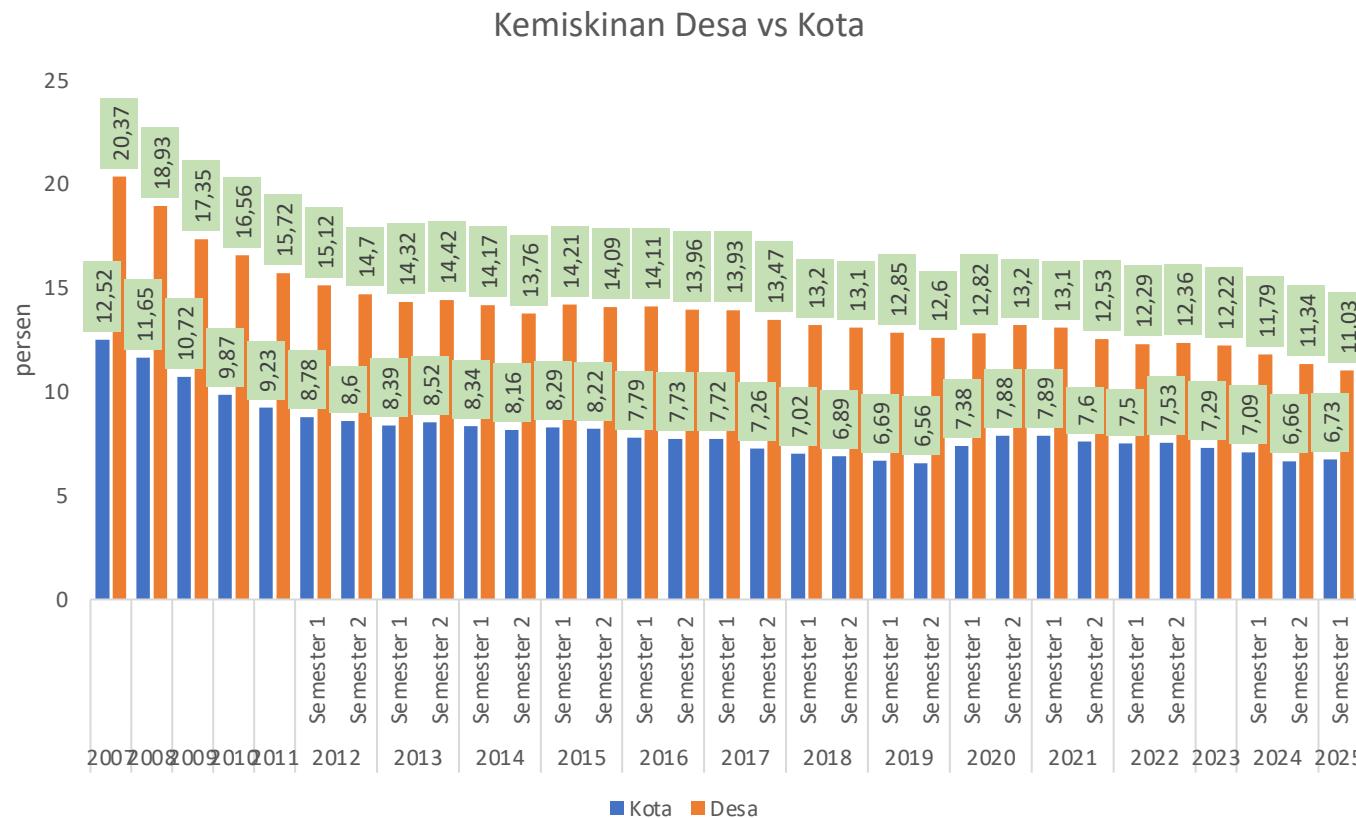
Potret Kemiskinan Indonesia yang Stagnan



Sumber : BPS, 2025

- Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup masih di satu sisi mendorong kemiskinan secara nasional hingga pada tahun 2017, kemiskinan Indonesia mencapai 1 digit saja
- Namun demikian, penurunan tersebut saat ini menuju ke fase landai dimana penurunan tidak signifikan

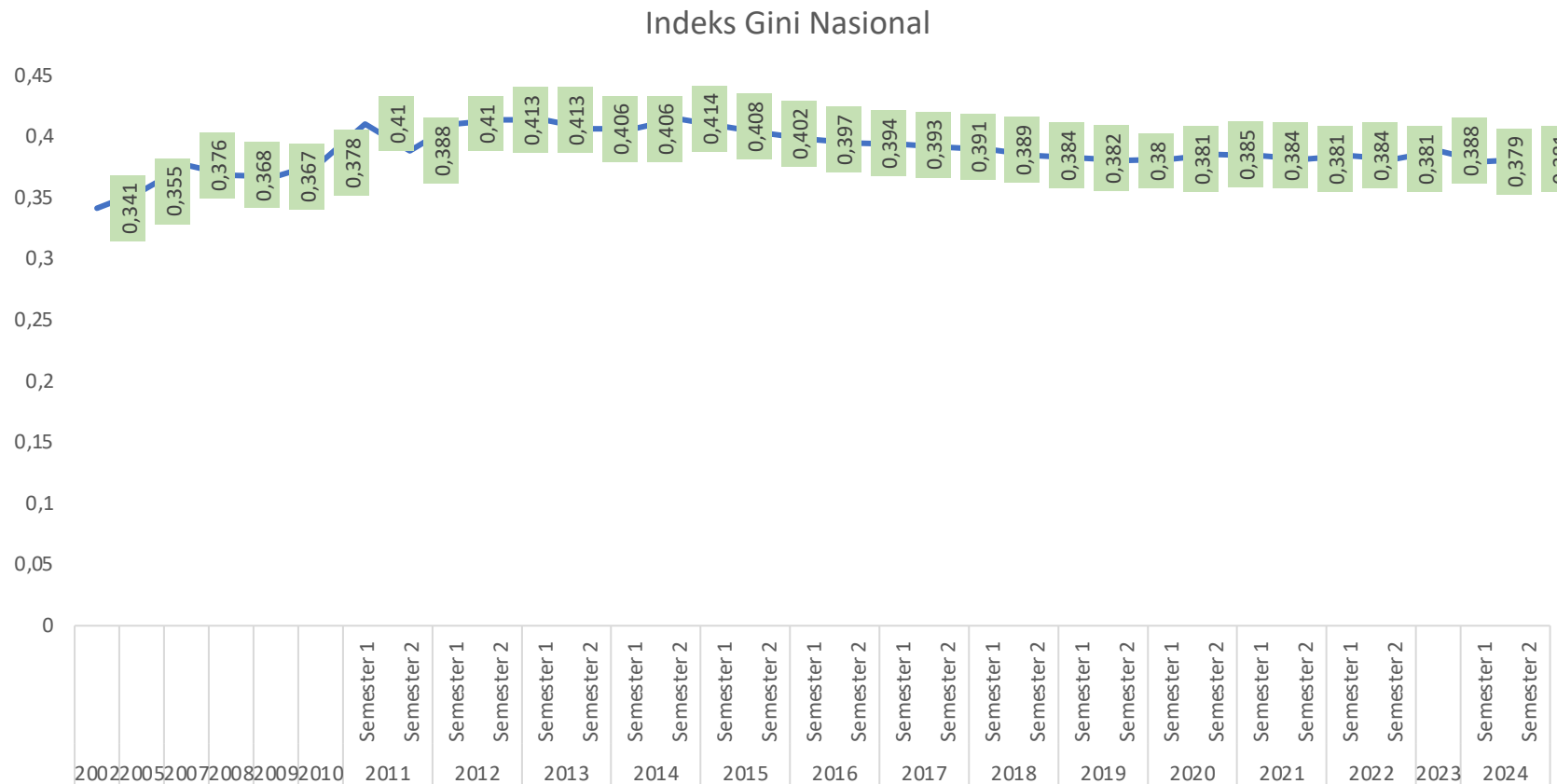
Kemiskinan Desa lebih besar dari Kota



- Permasalahan kemiskinan banyak terjadi di perdesaan dimana tingkat kemiskinan di desa mencapai 12,22 persen, dibandingkan perkotaan (7,29 persen)
- Permasalahan kemiskinan di desa bersumber pada masalah-masalah pertanian, kepemilikan lahan, serta pendapatan

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

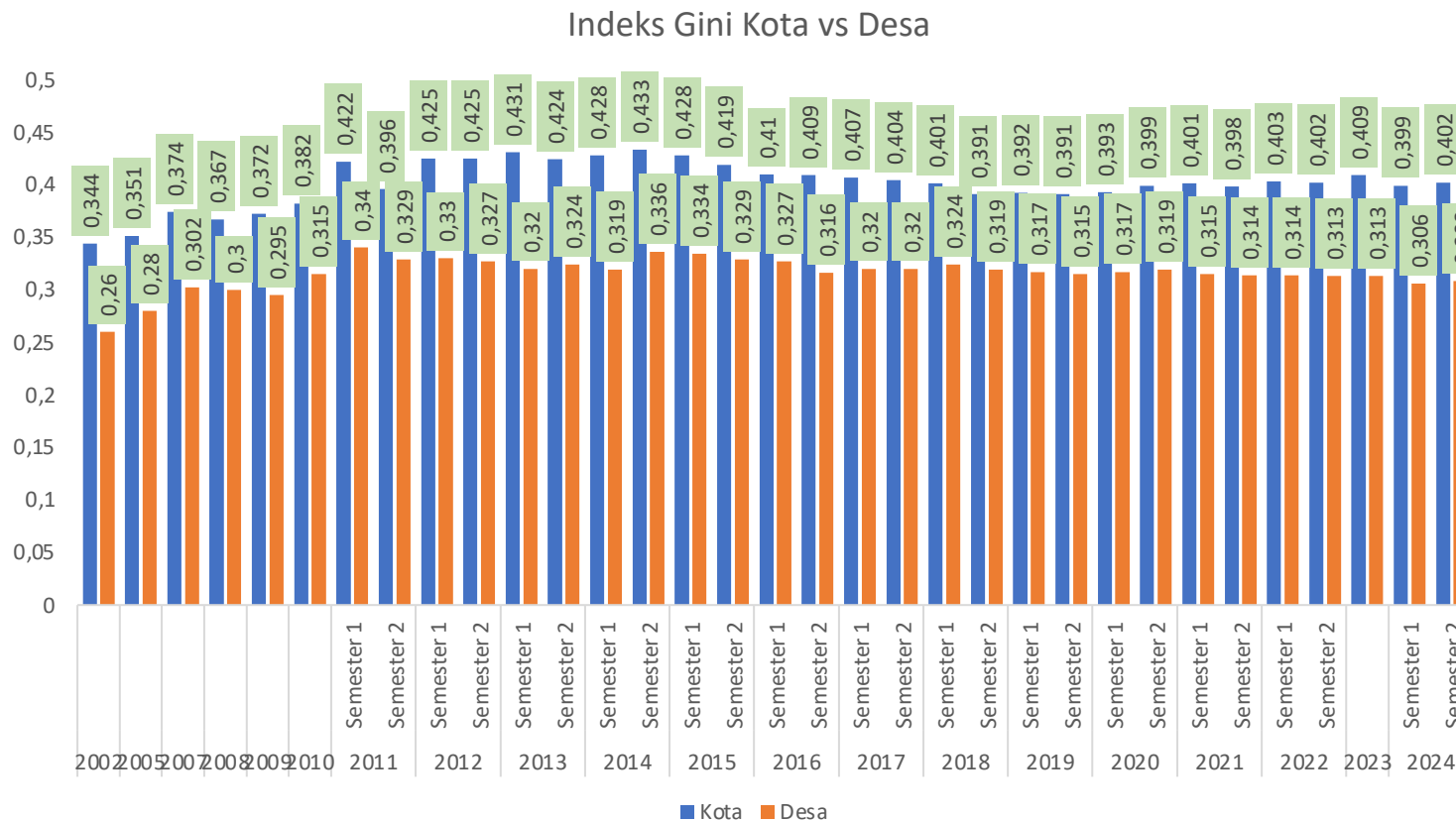
Pengeluaran Masyarakat Semakin Timpang



- Masalah Ketimpangan Ekonomi menjadi masalah baru selama pandemi
- Ketimpangan di perkotaan meningkat
- Banyak konglomerat yang bertambah hartanya di kala pandemi
- Tapi orang miskin semakin miskin
- Di tahun 2023, meski kemiskinan turun, ketimpangan meningkat

Sumber : BPS, 2024

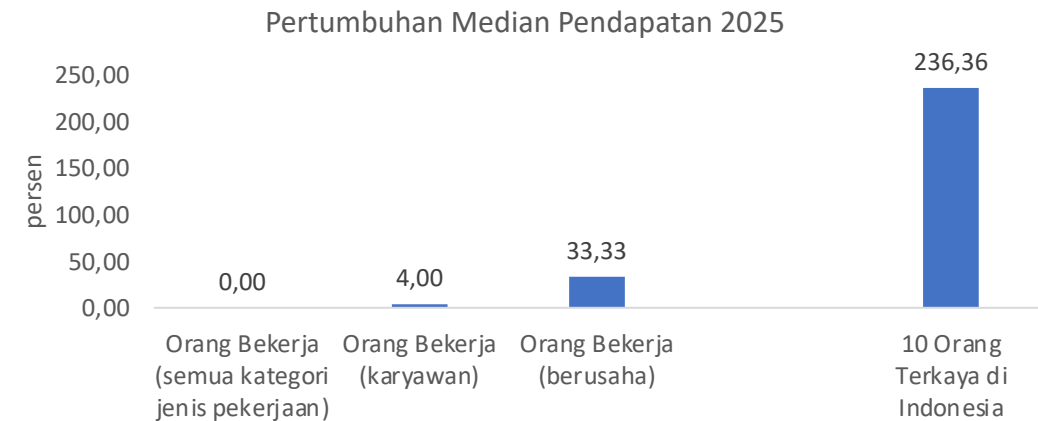
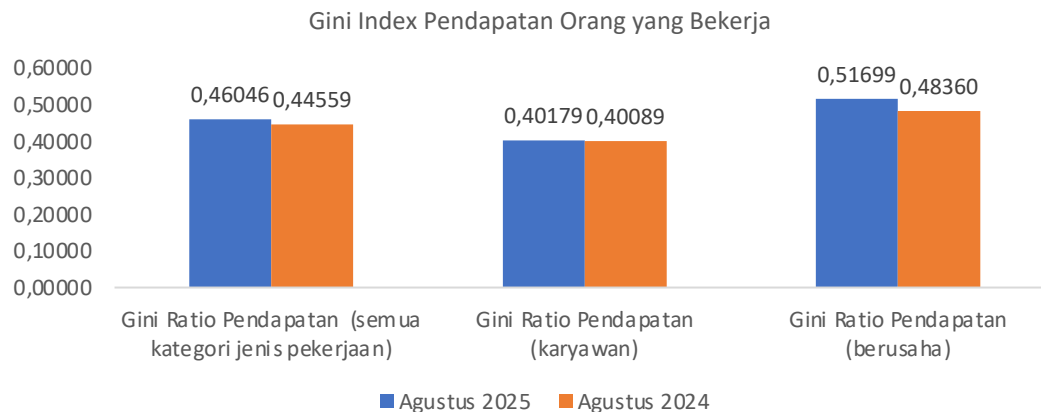
Ketimpangan di Kota Lebih Parah dari Desa



- Jika kemiskinan banyak di pedesaan, maka ketimpangan paling tinggi terjadi di daerah perkotaan
- Kesempatan mendapatkan pekerjaan hingga tinggi-nya perbedaan gaji menyebabkan ketimpangan di perkotaan lebih parah

Sumber : BPS, 2024

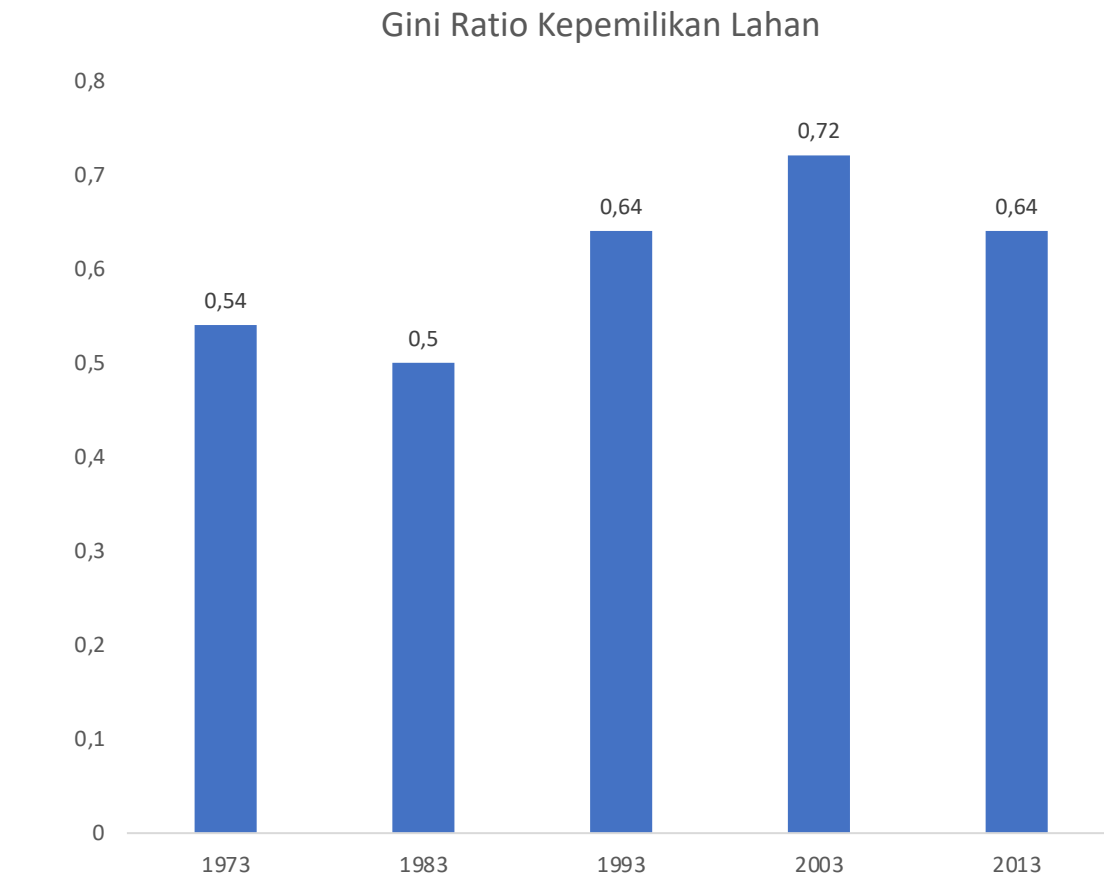
Ketimpangan Pendapatan Masyarakat



- Median merupakan data tengah dimana menunjukkan sebagian besar
- Pertumbuhan median orang bekerja jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan total pendapatan 50 orang terkaya (kolektif)
- Akibatnya gini index pendapatan orang yang bekerja semakin timpang

Sumber : BPS dan Forbes, 2026

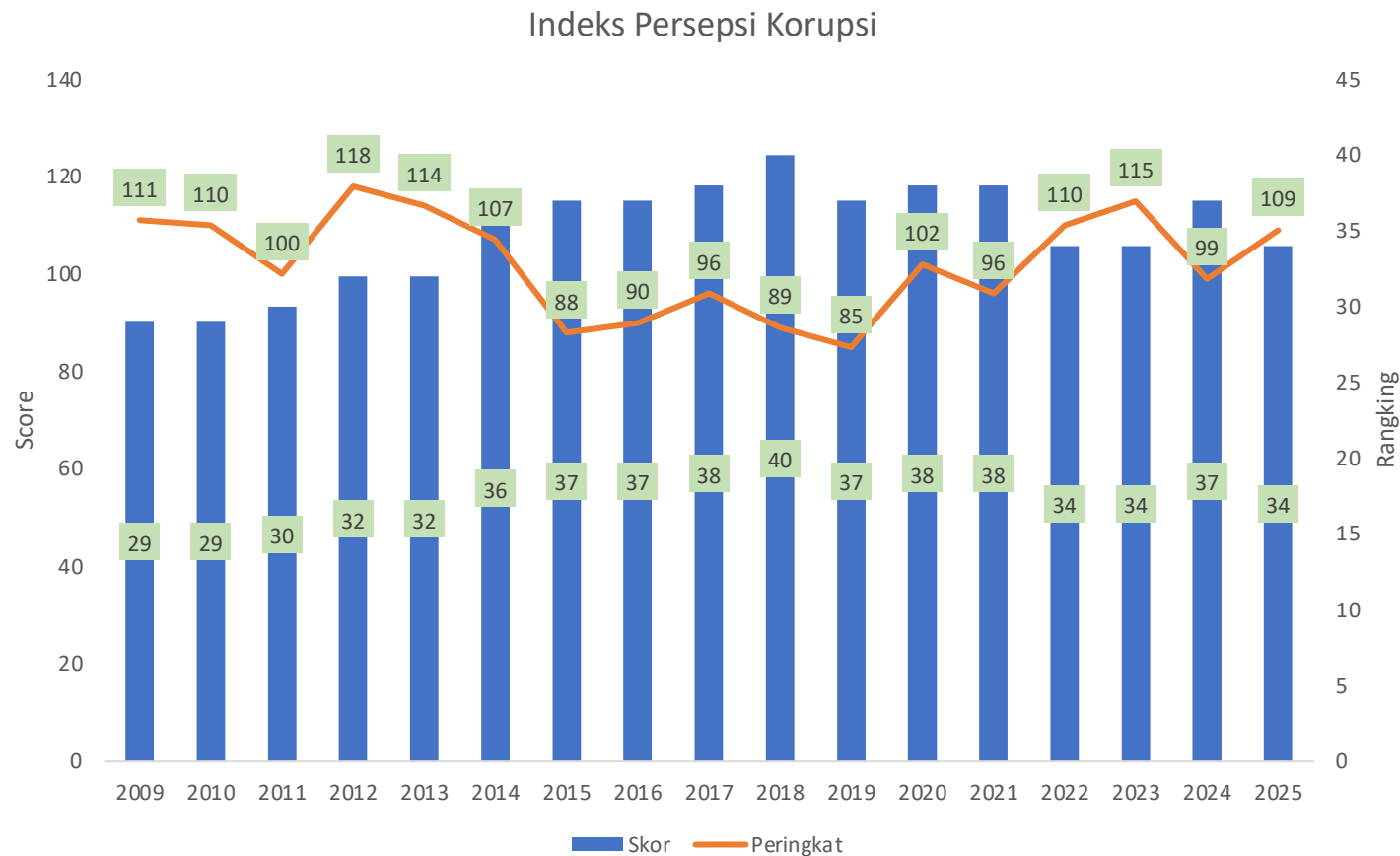
Ketimpangan Lahan Sangat Parah



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

- Ketimpangan lahan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan ketimpangan pengeluaran
- Penguasaan lahan oleh segelintir kalangan menyebabkan akses terhadap ekonomi menjadi sulit

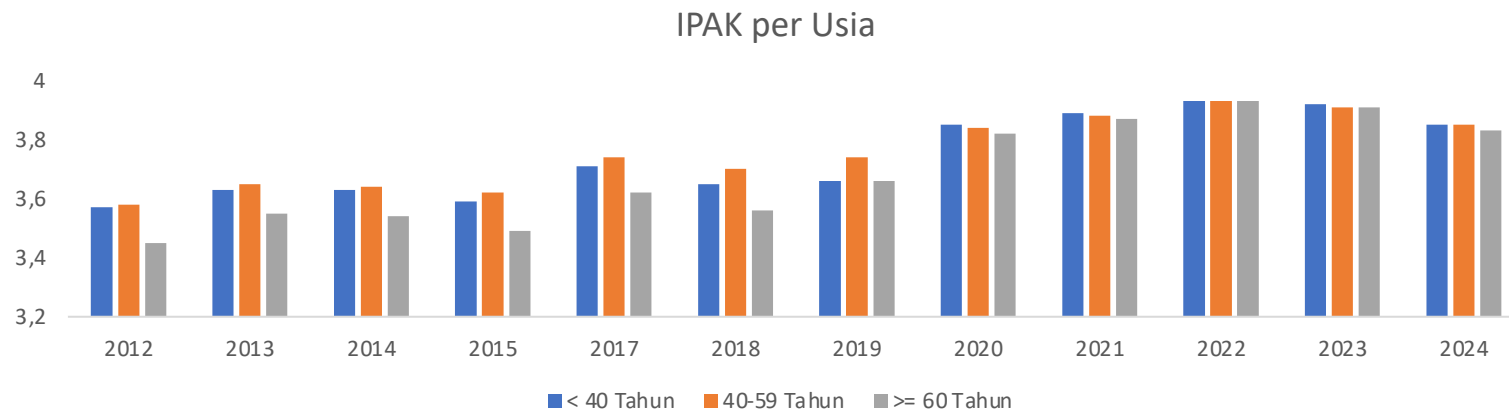
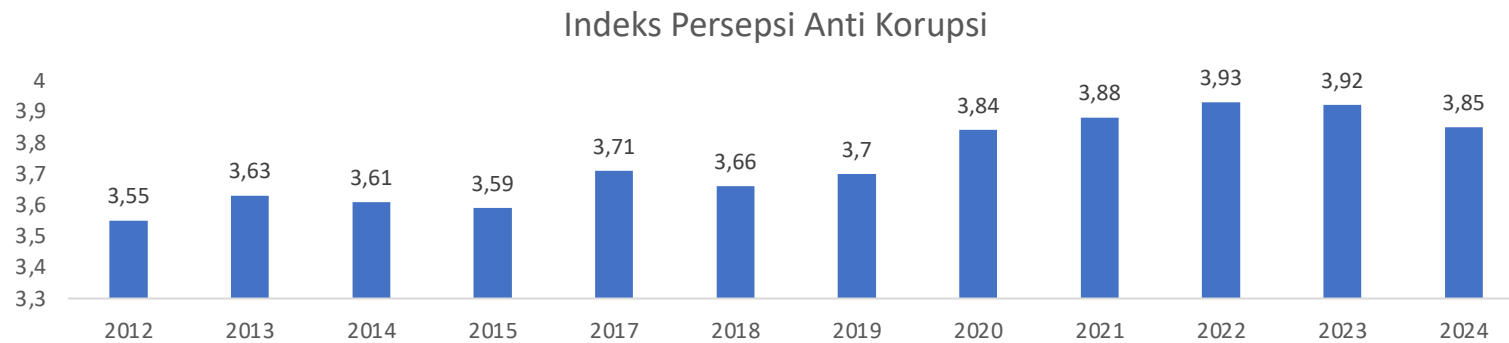
Corruption Index Semakin Parah



Sumber: TII, 2026

- Compared with countries in ASEAN, Indonesia's Corruption Perception Index score is only better than the Philippines (33), Lao PDR (31), Cambodia (24), and Myanmar (23).
- Indonesia's Corruption Perception Index score is much worse compared to Singapore which has a Corruption Perception Index score of 83 out of 100
- Malaysia, a country which is also famous for its Prime Minister's corruption case, has a Corruption Perception Index score of 47
- In fact, the handling of corruption in Indonesia is worse compared to Timor Leste, which has a Corruption Perception Index score of 42.

Semakin Permisif terhadap Perilaku Korupsi



- Masyarakat Indonesia semakin mempersilahkan tindakan korupsi dalam aktivitas ekonomi
- Mulai dari masuk lewat jalur orang dalam hingga korupsi pengadaan barang publik
- Parahnya, usia muda paling permisif terhadap perilaku korupsi

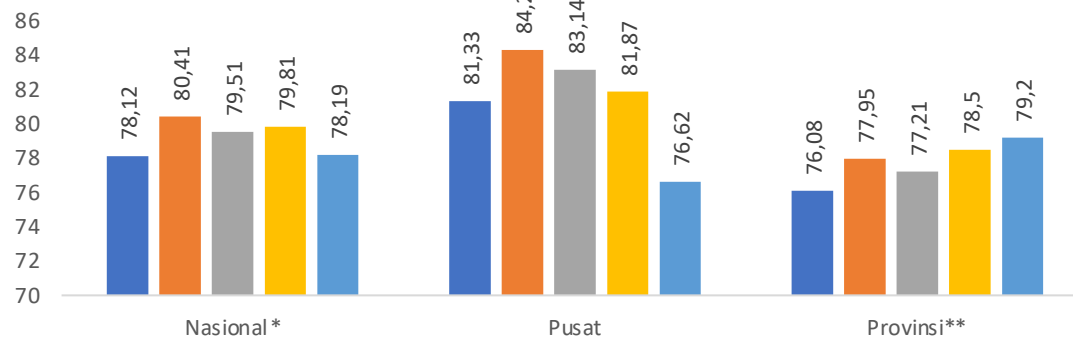
Sumber: BPS, 2024

Negara Semakin Tidak Demokratis

Indeks Demokrasi Nasional*



Indeks Demokrasi Indonesia



■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024 ■ 2025

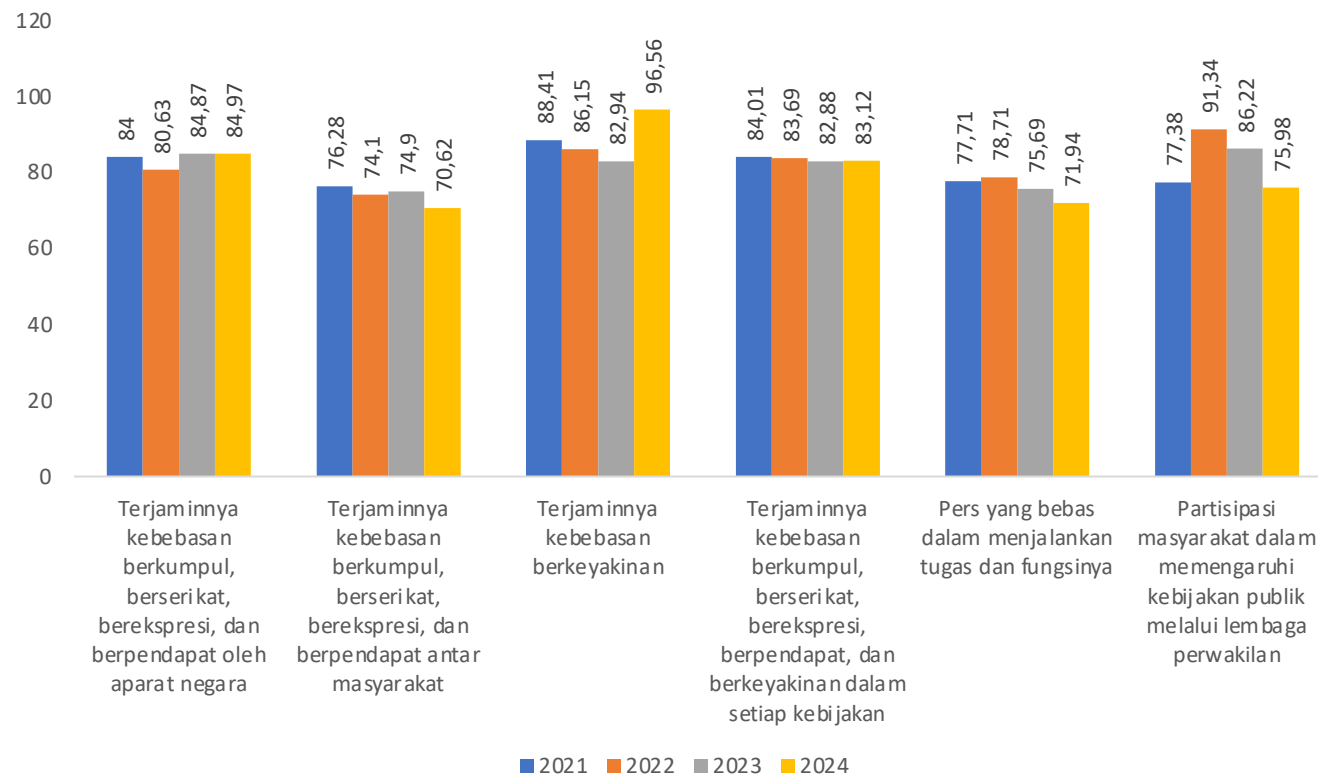
Kinerja IDI per Indikator



Sumber: BPS, 2025

Negara Semakin Tidak Demokratis

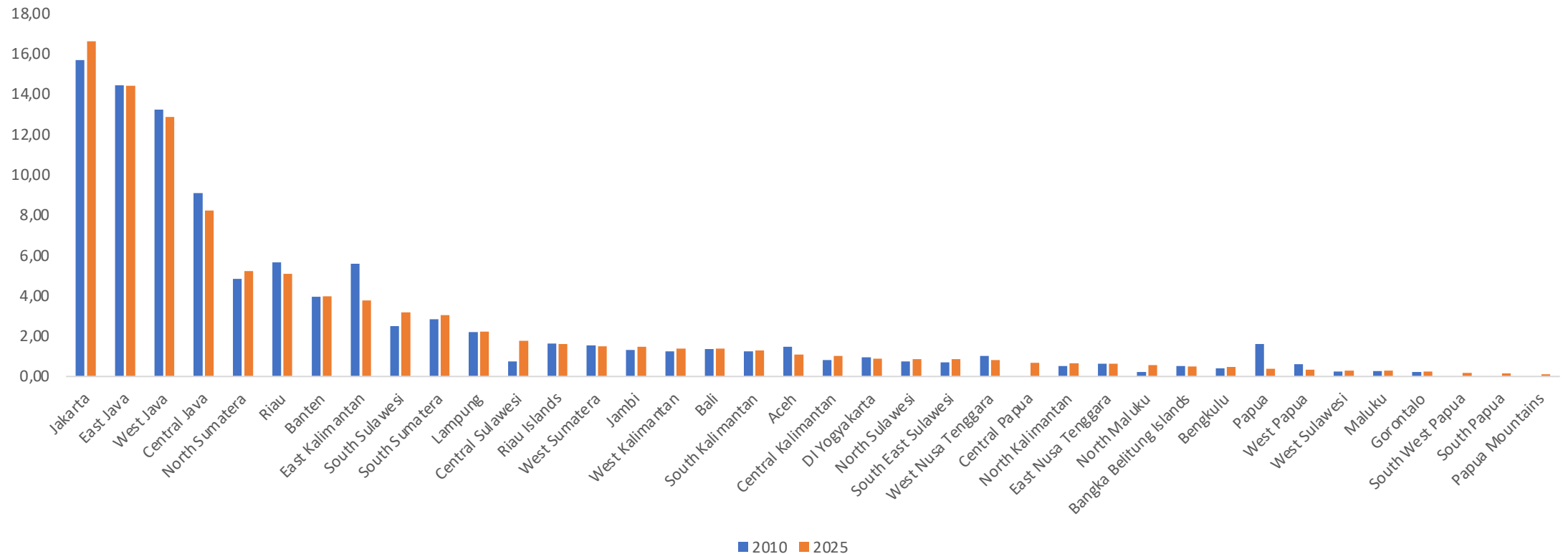
Indikator IDI terkait Kebebasan Individu



- Dalam survei di tahun 2024, terjadi pemburukan dalam terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat antar masyarakat dan juga kebebasan pers
- Contoh kasus pelaporan-perlaporan individu oleh individu lainnya

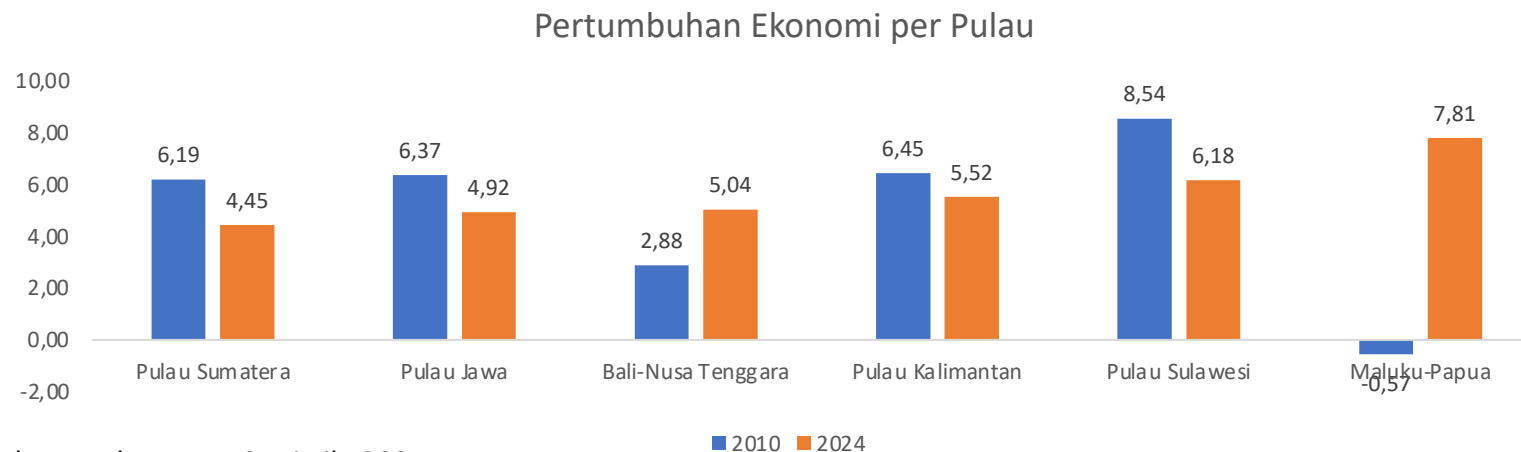
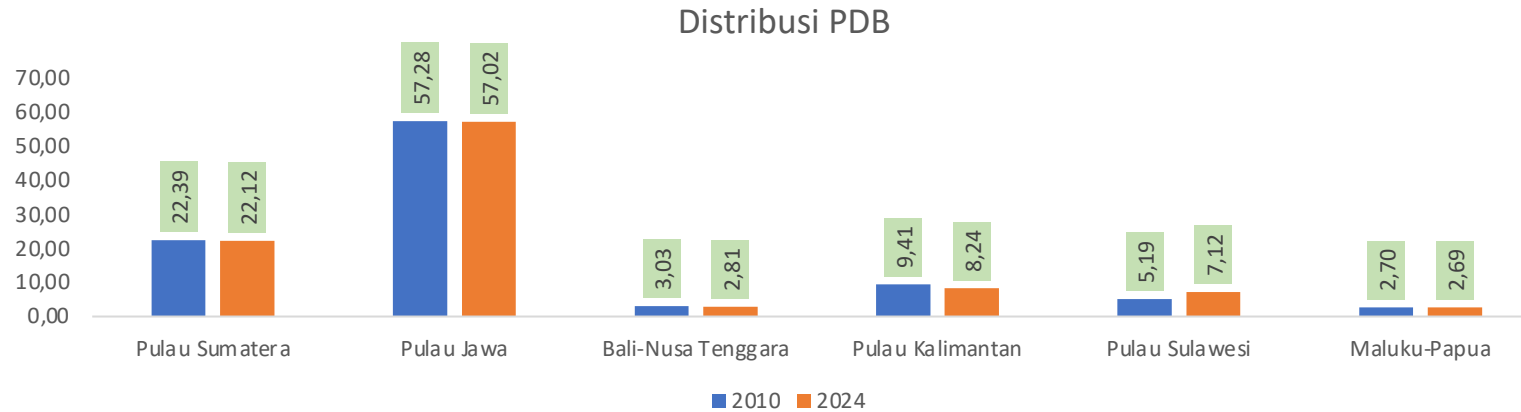
Indonesia sentris Apakah Berhasil?

Proporsi PDRB terhadap PDB Nasional



Sumber : CEIC, Diolah 2026

Indonesia sentris Apakah Berhasil?

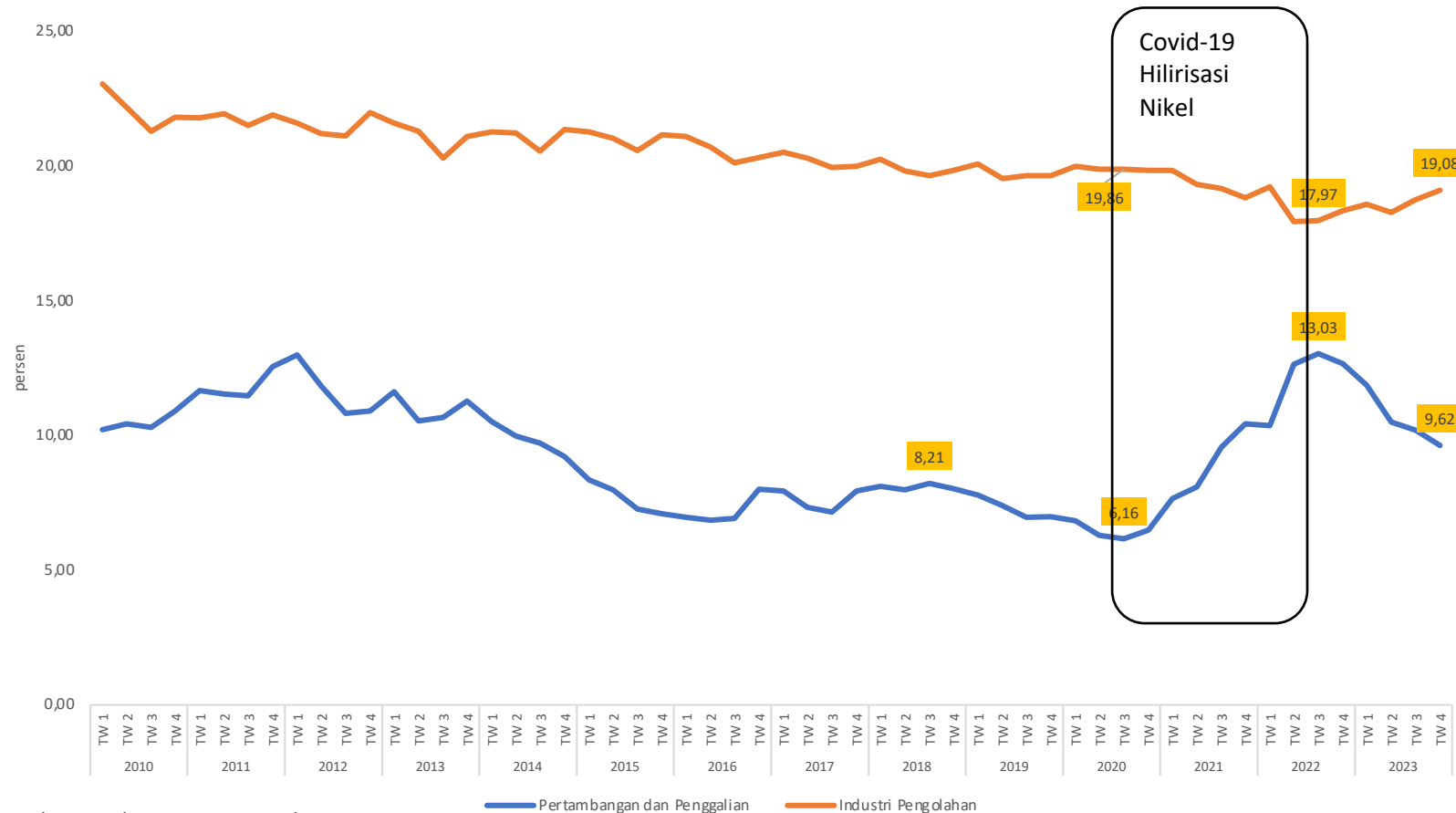


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

- Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh ekonomi pulau Jawa
- Pertumbuhan Maluku-Papua memang besar, namun lebih dikarenakan low-based effect

Penghijauan Ekonomi

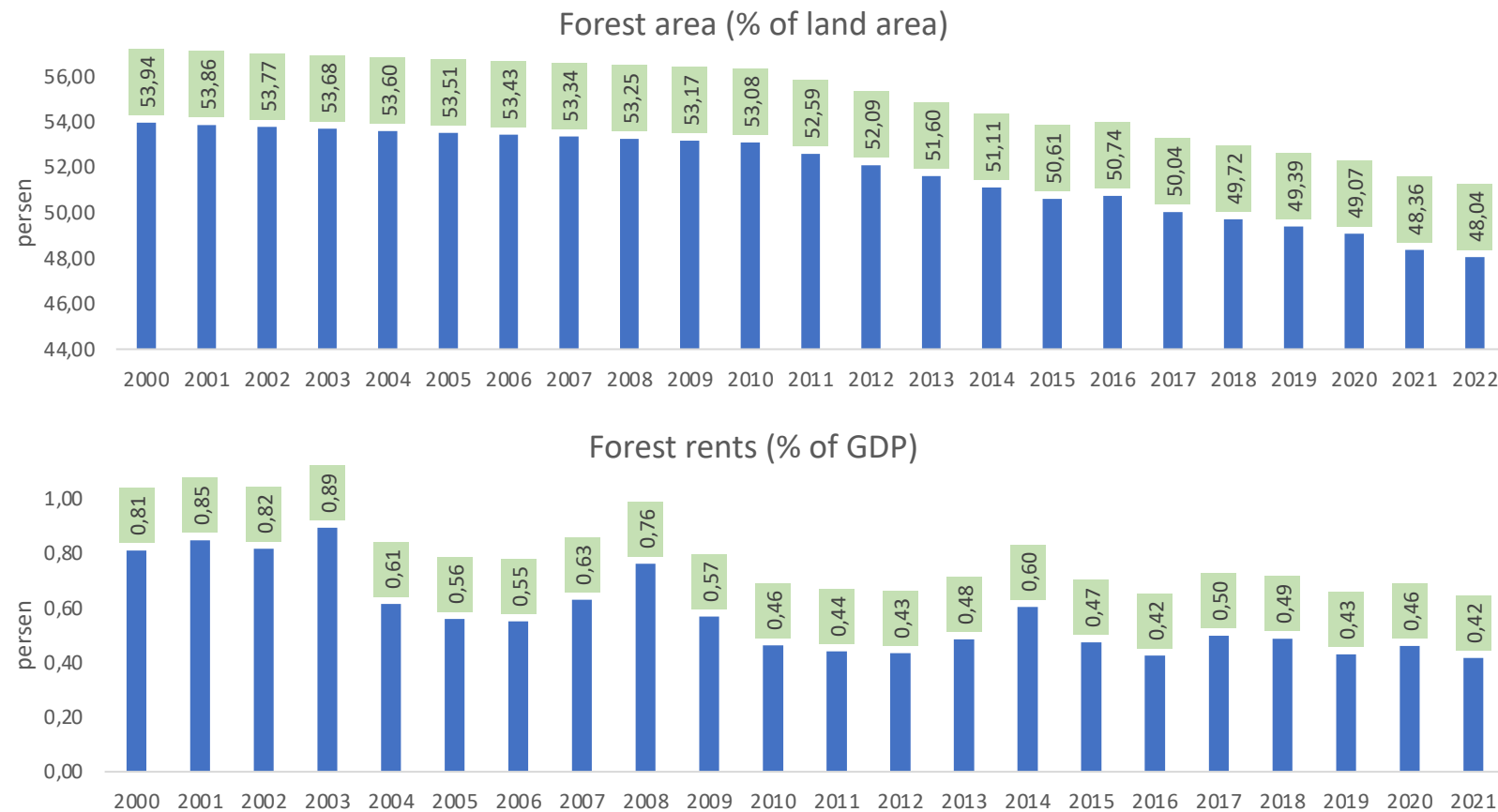
Peranan Sektor Pertambangan terhadap Ekonomi Nasional meningkat ketika terjadi program hilirisasi



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

- Pada kurun waktu 2010 hingga 2014, sektor pertambangan bukan menjadi primadona untuk menopang perekonomian nasional, terlihat dari tren yang menurun ketika zaman SBY jilid II
- Di Zaman Jokowi, tren pertambangan meningkat seiring dengan program hilirisasi yang ternyata membawa manfaat buruk bagi kesehatan maupun ekonomi (Celios dan CREA, 2024)
- Terlebih di tahun 2020 hingga 2022, ketika relaksasi nikel digencarkan dan ekspor dilarang, porsi sektor tambang meningkat menjadi 13 persen

Kepedulian Lingkungan Kurang

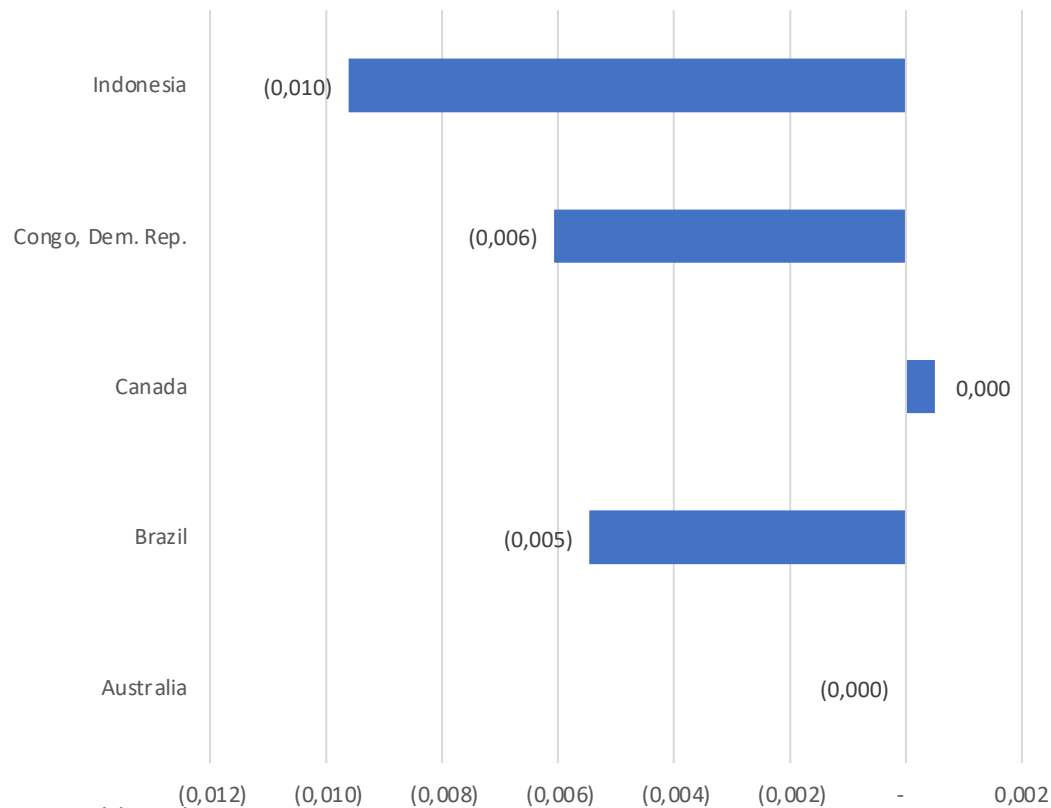


Sumber: World Bank, 2025

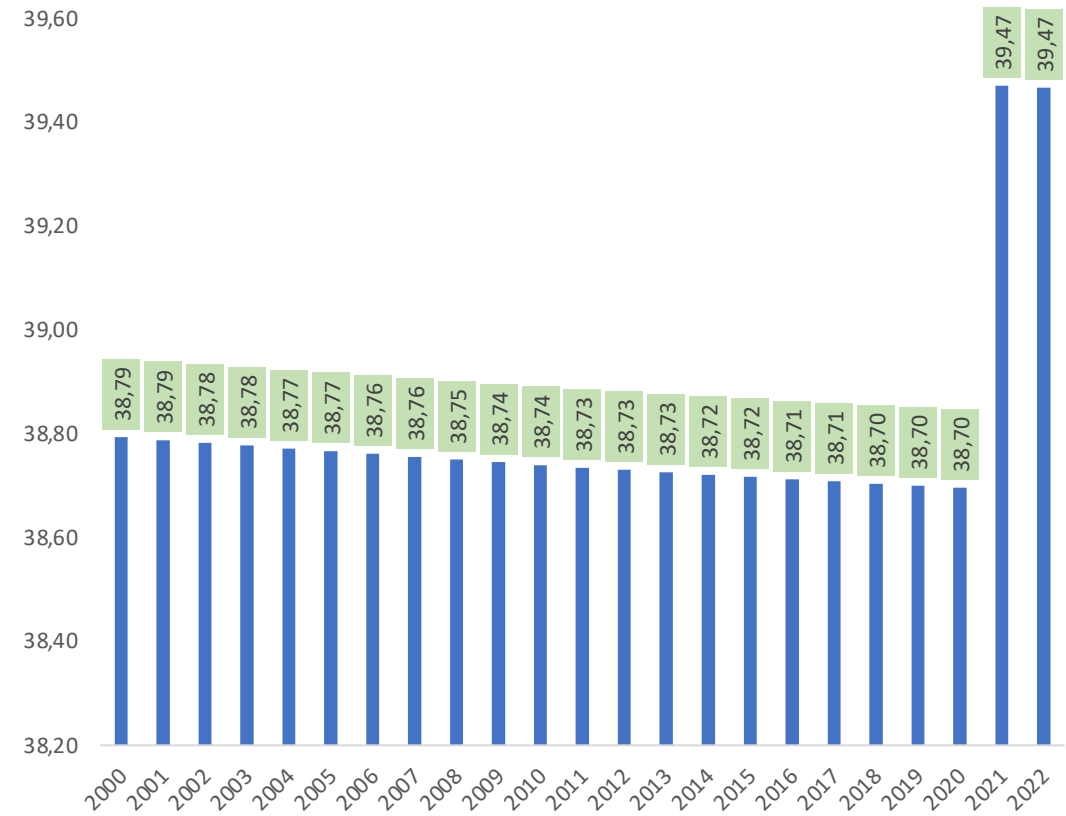
- Walaupun produksi menurun, namun proporsi hutan di Indonesia berkurang tajam
- Forest rent (% of GDP) menurun dari 0,81% (2000) menjadi 0,42% (2021), mencerminkan menurunnya kontribusi hutan terhadap ekonomi akibat konversi lahan, yang memperbesar risiko hilangnya fungsi ekologis hutan (carbon sink & biodiversity) meski pertumbuhan ekonomi tetap ditopang sektor lain.

Kepedulian Lingkungan Kurang

Perubahan Lahan Hutan (% dari total lahan)



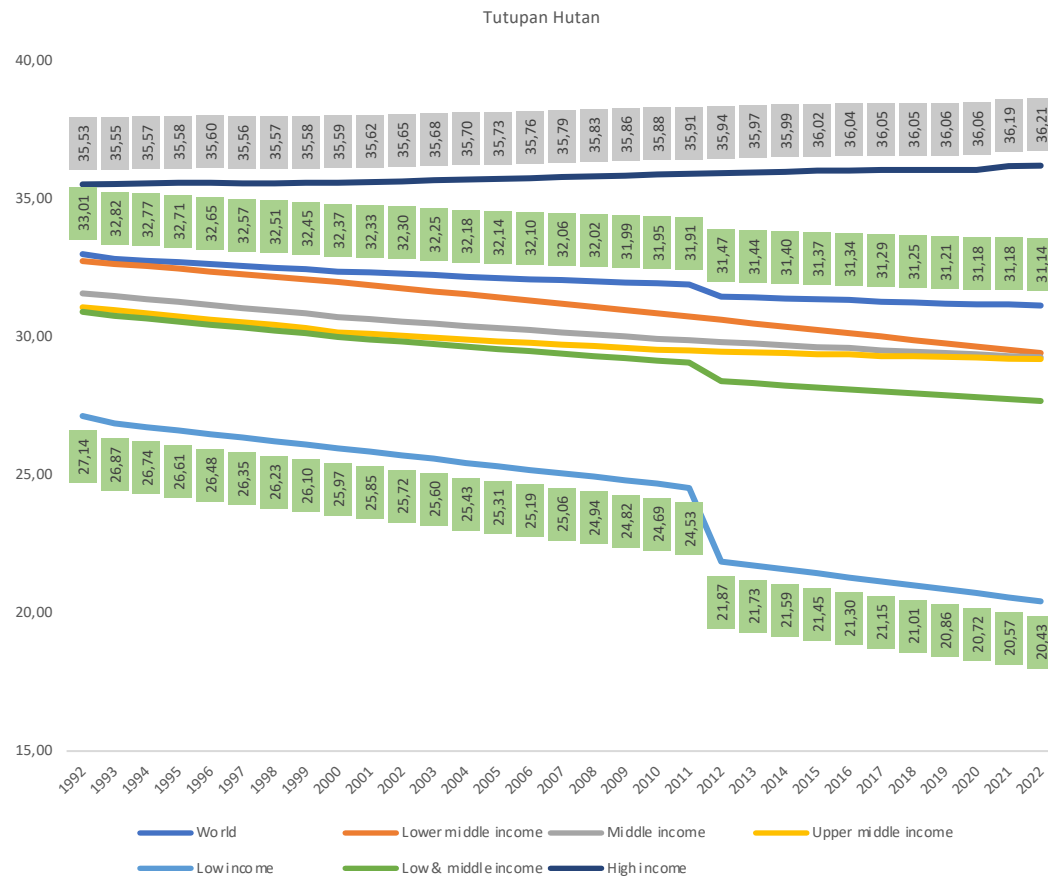
Luas Hutan di Canada (% dari total lahan)



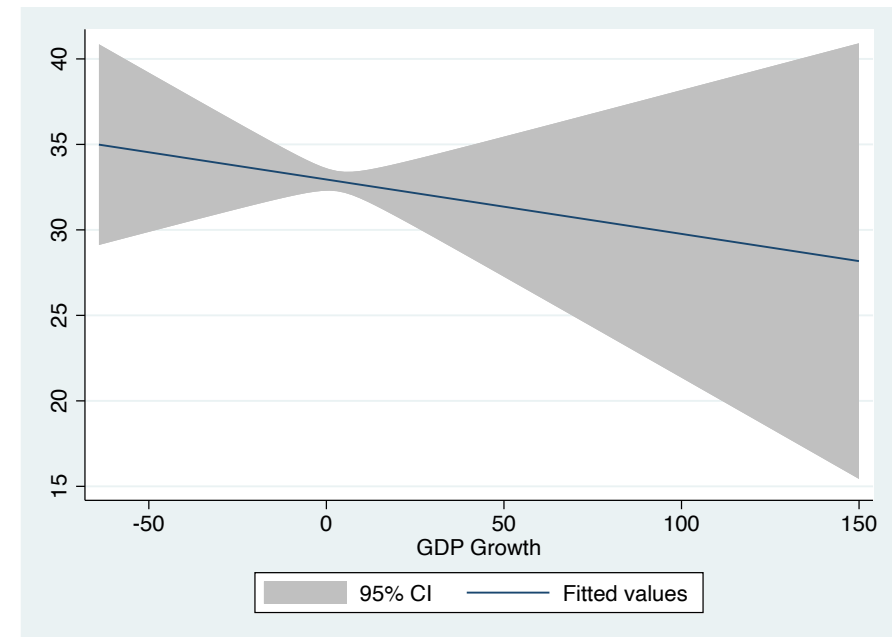
Sumber: World Bank, 2025

GDP Growth dan Luas Hutan itu Negatif

- Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah tutupan hutan

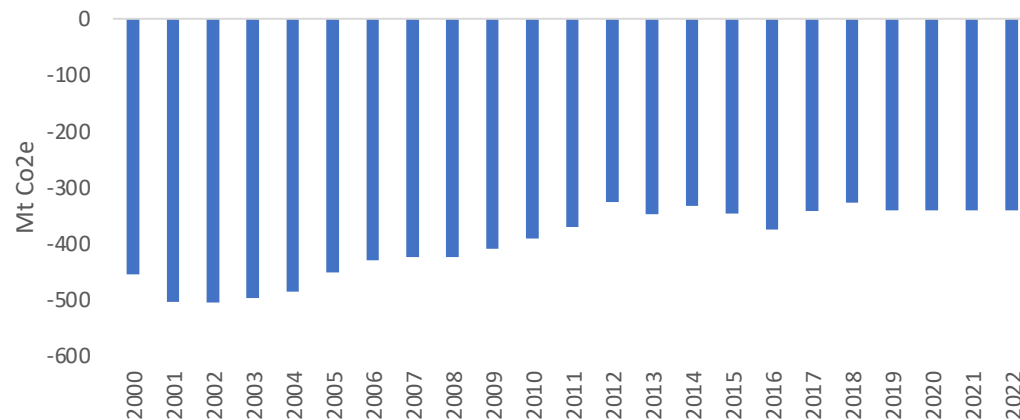


Sumber : World Bank, Diolah 2025

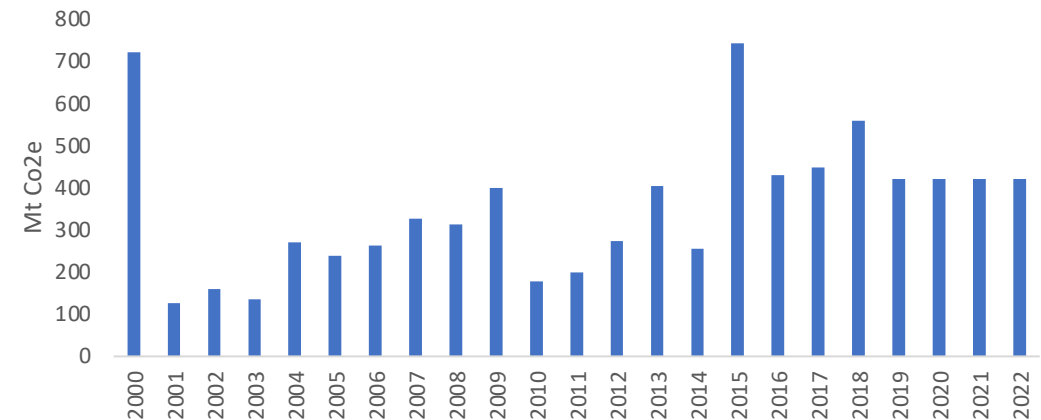


Kepedulian Lingkungan Kurang

Carbon dioxide (CO₂) net fluxes from LULUCF - Forest Land (Mt CO₂e)



Carbon dioxide (CO₂) net fluxes from LULUCF - Deforestation (Mt CO₂e)



Hutan Masih Menjadi Penyerap Karbon, tapi Kapasitasnya Menurun

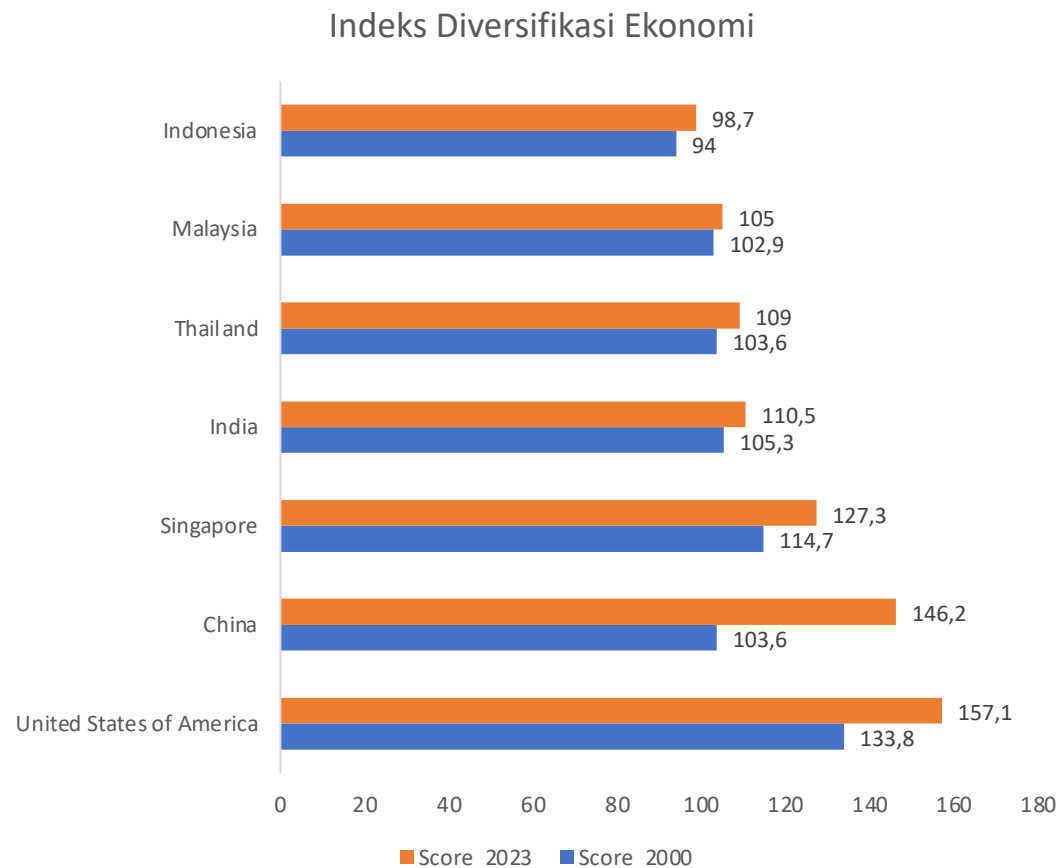
Grafik kiri menunjukkan *net fluxes* dari hutan (forest land) tetap negatif, artinya hutan masih menyerap karbon. Namun, jumlah penyerapan berkurang dari sekitar **-500 Mt CO₂e di awal 2000-an** menjadi hanya **-300 Mt CO₂e pada 2020-an**. Ini menandakan degradasi hutan mengurangi kemampuan Indonesia menyerap emisi.

Deforestasi Jadi Sumber Emisi Besar dan Fluktuatif

Grafik kanan memperlihatkan emisi dari deforestasi yang tinggi dan tidak stabil, dengan lonjakan signifikan pada **2015 (lebih dari 700 Mt CO₂e)** akibat kebakaran hutan/lahan gambut. Meski sempat turun, level emisi deforestasi tetap tinggi di atas **400 Mt CO₂e** dalam dekade terakhir, menjadi tantangan utama bagi komitmen iklim Indonesia.

Sumber: World Bank, 2025

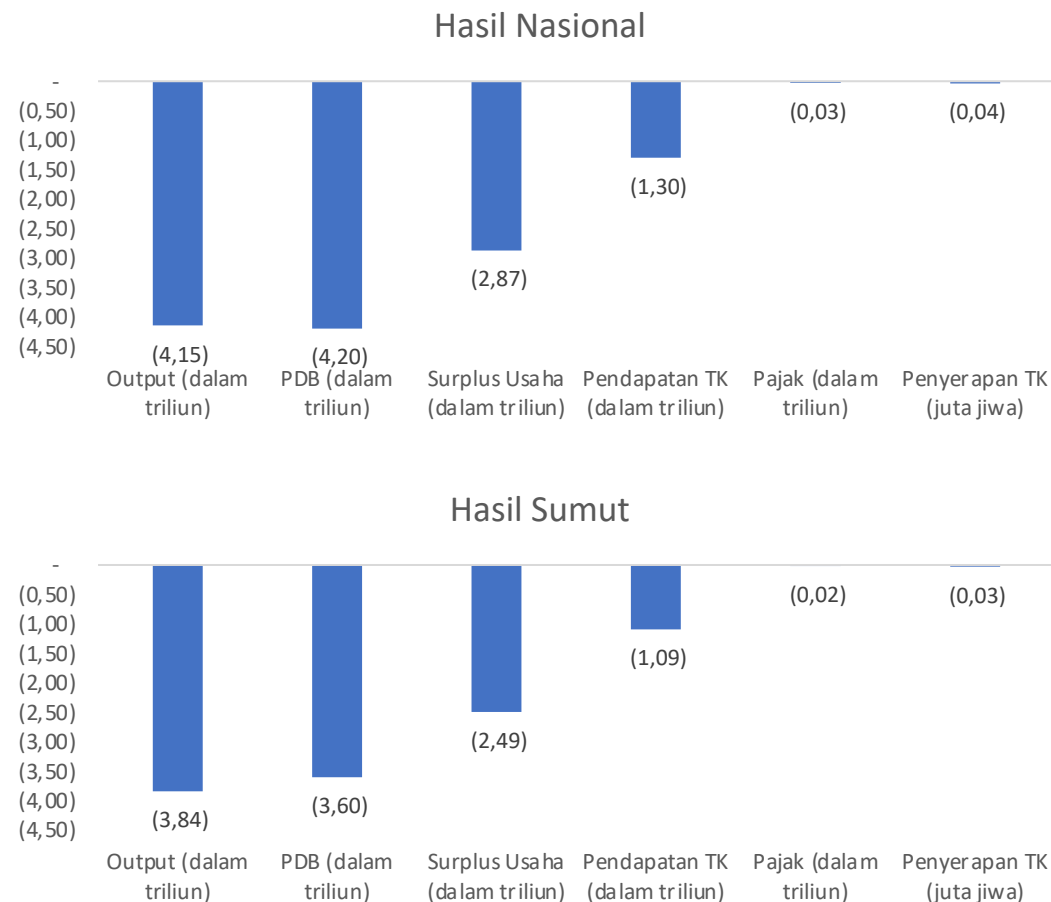
Diversifikasi Ekonomi?



Sumber: Global Economic Diversification Index, 2025

- **Indonesia Masih Tertinggal dalam Diversifikasi**
Indeks diversifikasi ekonomi Indonesia hanya **98,7 (2023)**, lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Malaysia (105) dan Thailand (109). Rendahnya diversifikasi membuat ekonomi Indonesia rentan pada komoditas tradisional, termasuk batubara dan CPO yang kini menghadapi tekanan regulasi hijau global.
- **Negara dengan Skor Tinggi Lebih Cepat Beralih ke Produk Hijau**
China (146,2), AS (157,1), dan Singapura (127,3) menunjukkan tingkat diversifikasi yang tinggi. Diversifikasi ini memungkinkan mereka lebih mudah mengembangkan **industri berbasis energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan produk rendah karbon**, sehingga lebih siap menghadapi regulasi global seperti CBAM dan EUDR.
- **Dorongan bagi Indonesia untuk Mengembangkan Industri Hijau**
Untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia perlu memperluas basis produksinya dari sekadar komoditas primer menuju **produk bernilai tambah ramah lingkungan** (misalnya green steel, biofuel, dan produk pertanian berkelanjutan). Ini penting agar tetap kompetitif di pasar global yang semakin ketat dengan standar emisi dan keberlanjutan.

Degradation Cost Kasus Pembangunan Pabrik Kertas di Sumatera Utara

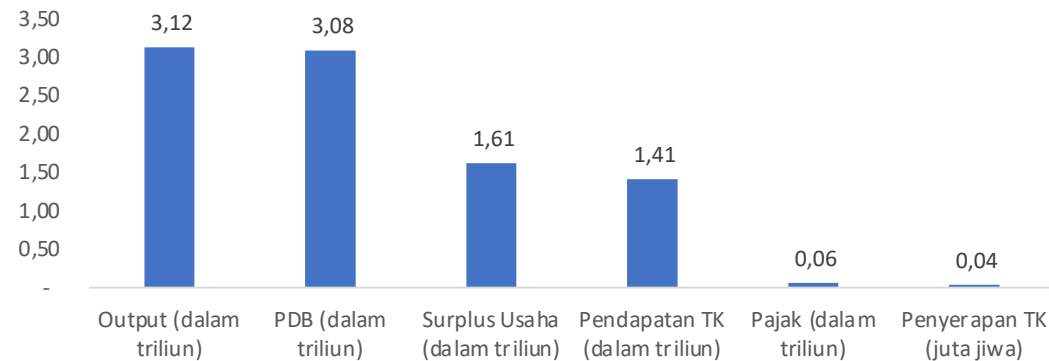


Asumsi

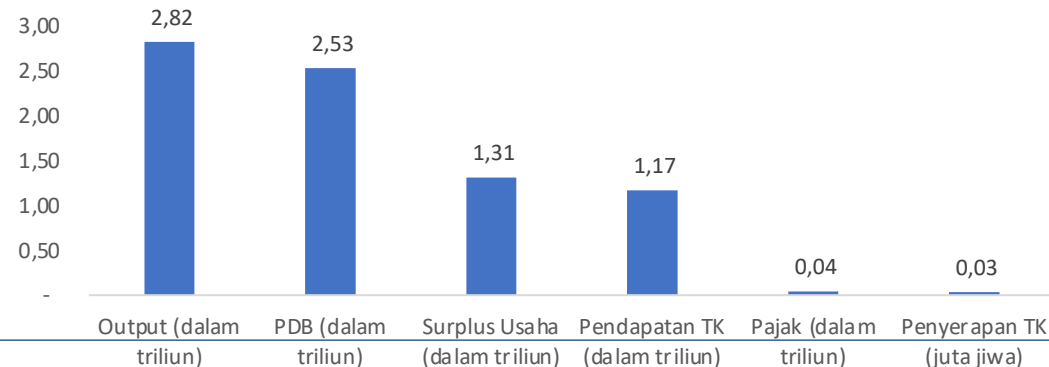
- Ada degradation cost sektor kehutanan dan produksi kayu sebesar Rp3,3 triliun (total degradation cost forest di Indonesia Rp61,43 T, share produksi kehutanan Sumut 5,34 persen dari total).

Restorative Economy

Hasil Nasional



Hasil Sumut

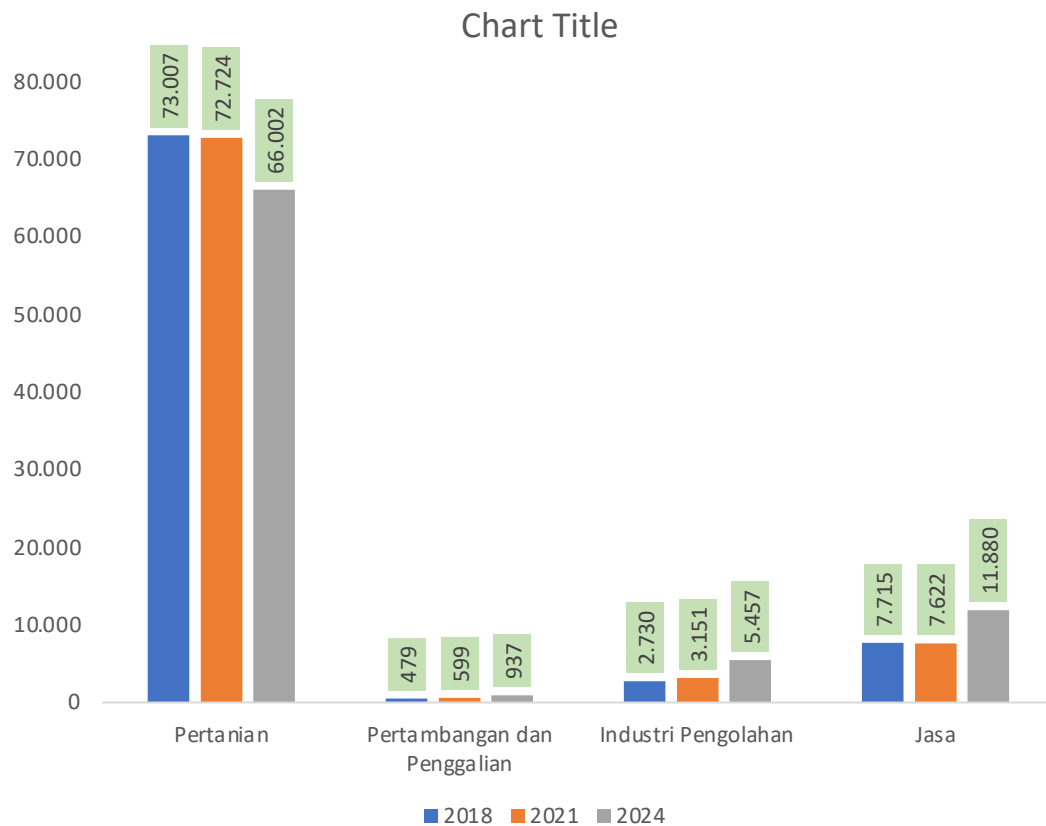


Presentasi ini adalah properti milik Celios

Asumsi

- Ada pertambahan investasi sebesar Rp630,7 juta (sektor perkebunan) dan Rp2,9 juta (sektor perikanan) (investasi dari Toba Pulp Lestasi yang dialihkan di tahun 2024 sebesar USD0,04 juta dikalikan rata-rata nilai USD/IDR Rp15.840 per USD)
- Ada tambahan investasi dari pemerintah sebesar Rp2,18 triliun per tahun untuk sektor perkebunan dan sektor perikanan masing-masing Rp2,17 triliun dan Rp9,9 miliar

Desa dengan Sektor Pertambangan sebagai sektor utama meningkat dari tahun 2018 ke 2024

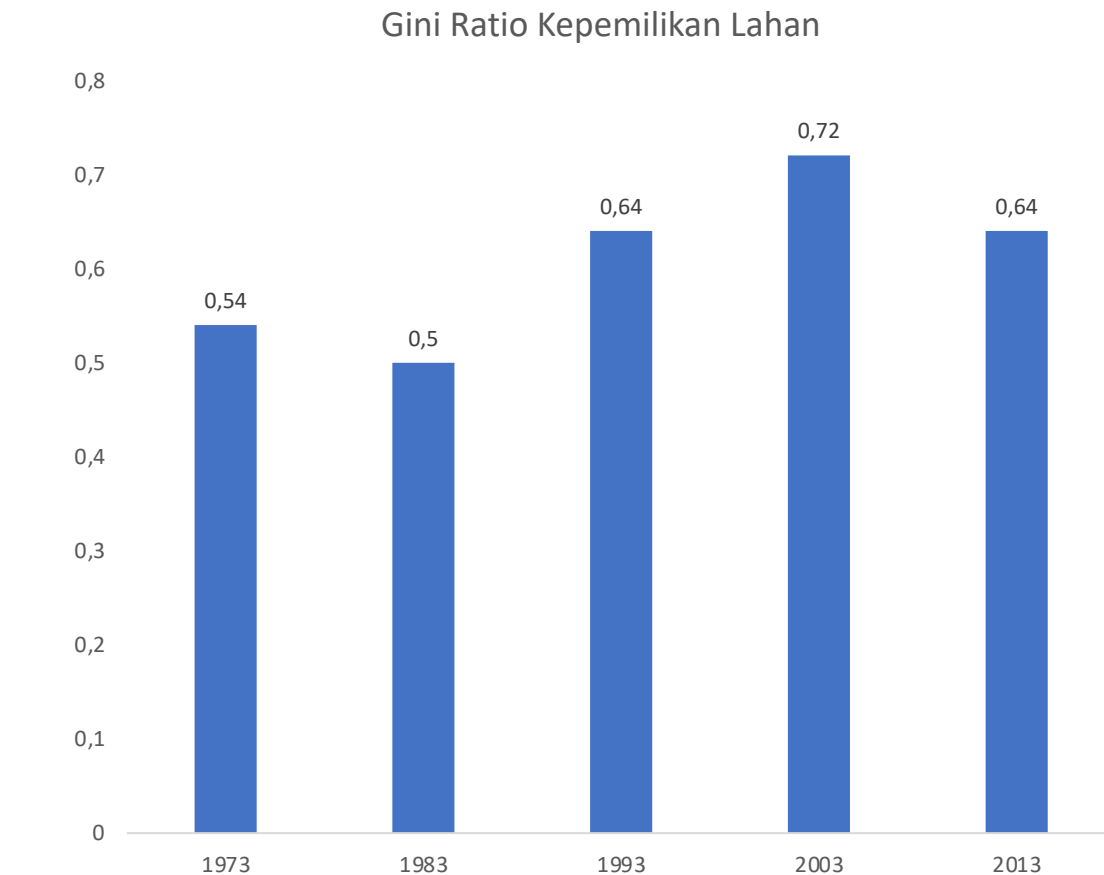


Sumber: Data Potensi Desa, Diolah, 2025

Menurut data podes, desa yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor mata pencaharian utama sejumlah 78,32 persen (2024), turun dari tahun 2018

Sedangkan, desa dengan sektor pertambangan dan penggalan yang menjadi sektor utama memiliki porsi 1,11 persen atau sejumlah 937 desa, naik dari tahun 2018 dan 2021

Ketimpangan Lahan Sangat Parah

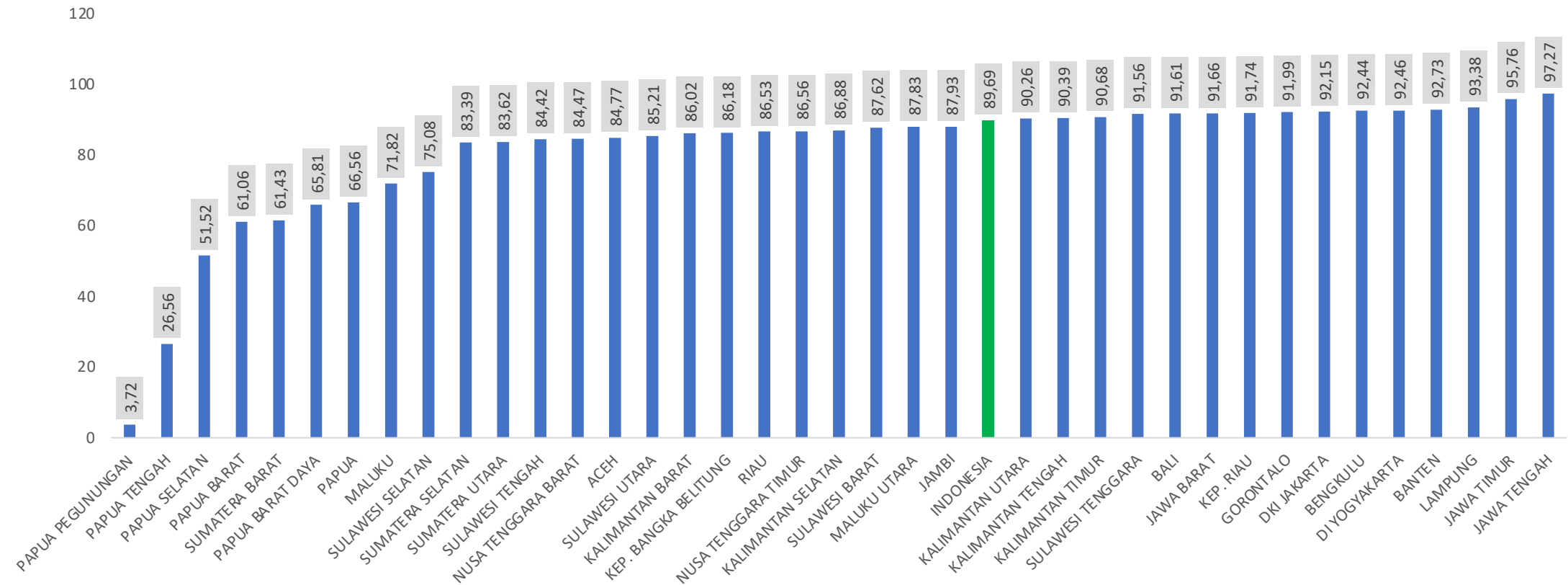


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

- Ketimpangan lahan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan ketimpangan pengeluaran
- Penguasaan lahan oleh segelintir kalangan menyebabkan akses terhadap ekonomi menjadi sulit

Sertifikasi Bangunan Tempat Tinggal

Presentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Bersertifikat

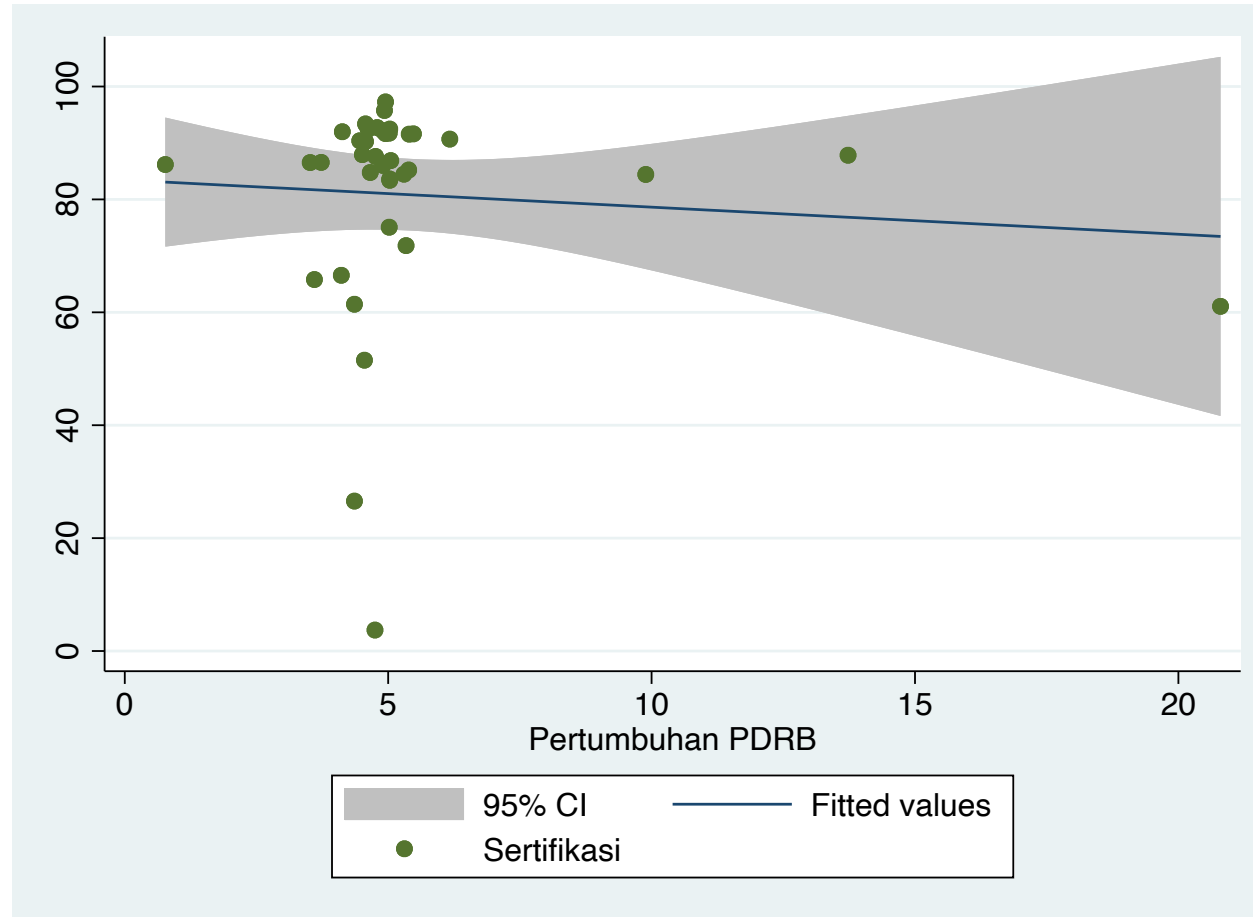


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Presentasi ini adalah properti milik Celios

CELIOS

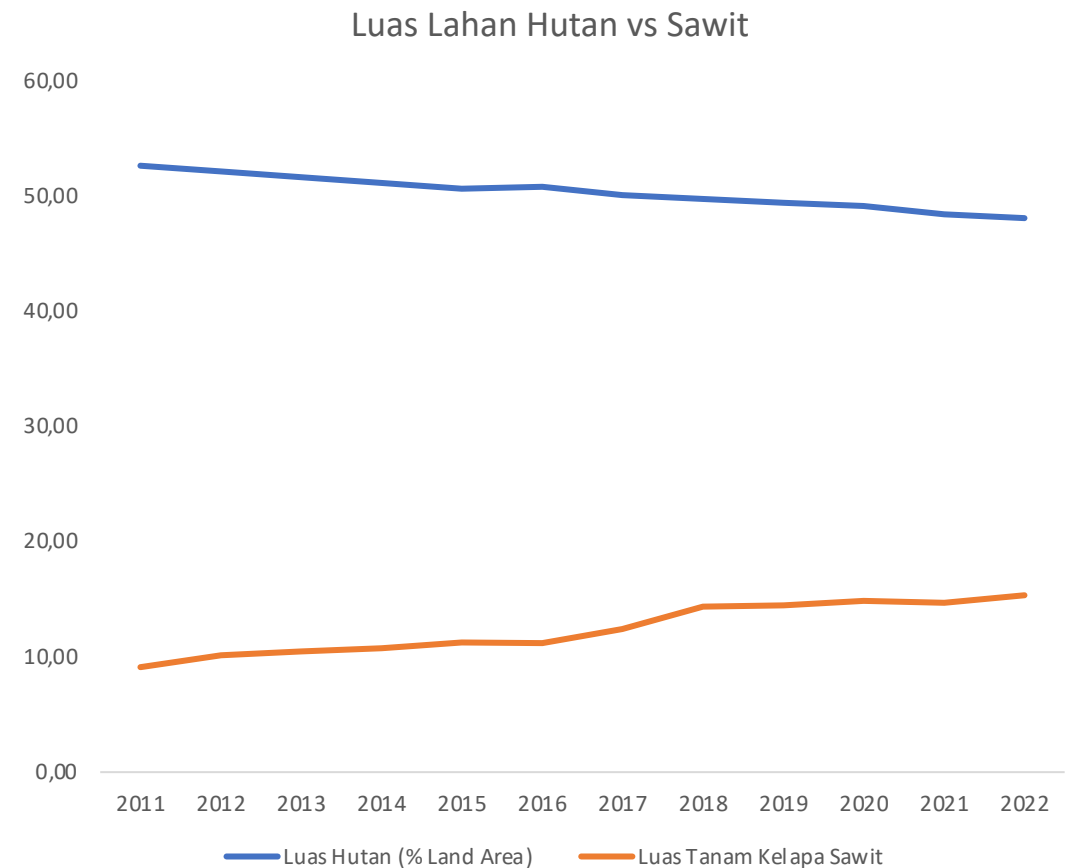
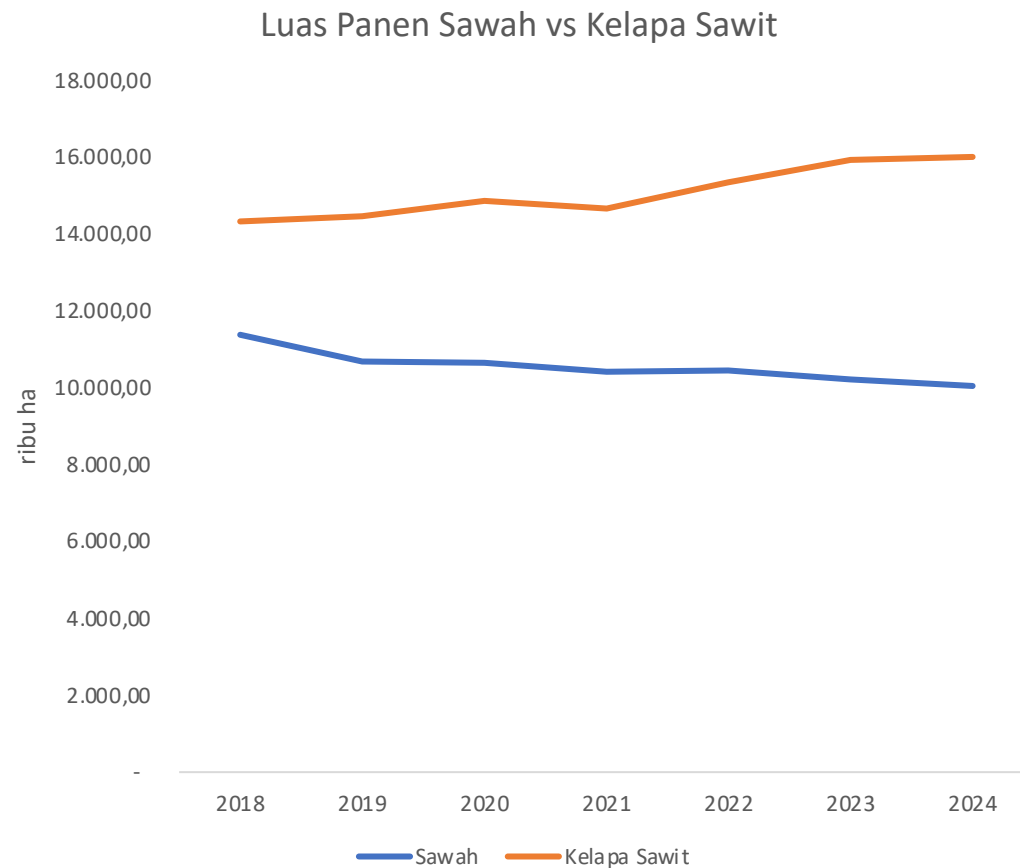
Korelasi Sertifikasi dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah



- Pemanfaatan sertifikat kepada aktivitas ekonomi masih kurang

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Lahan Sawah menjadi Sawit

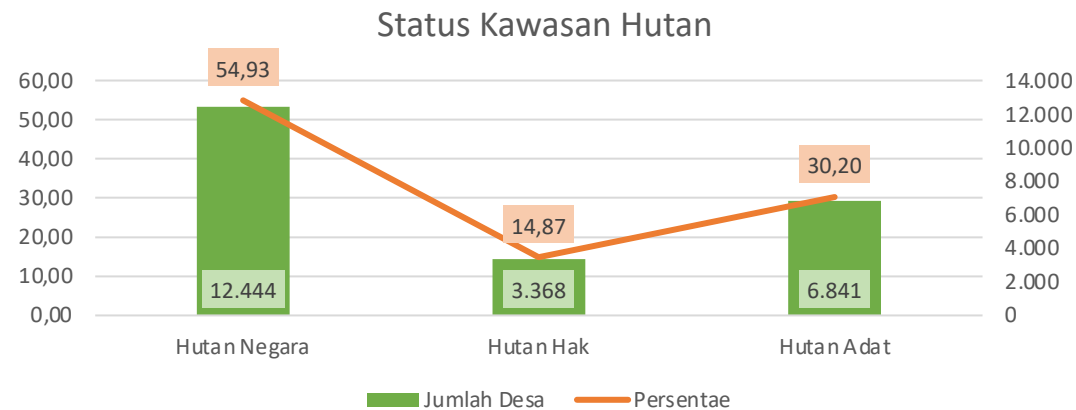
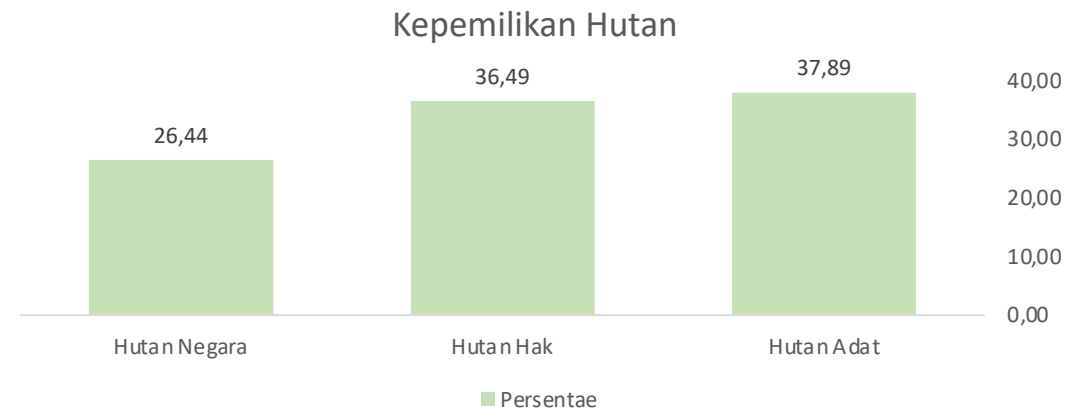
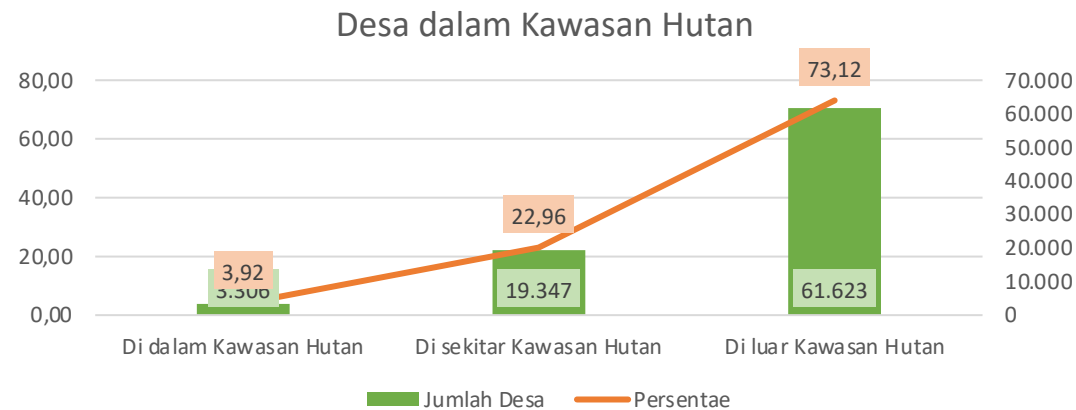


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Presentasi ini adalah properti milik Celios

CELIOS

Profil Desa dalam Kawasan Hutan

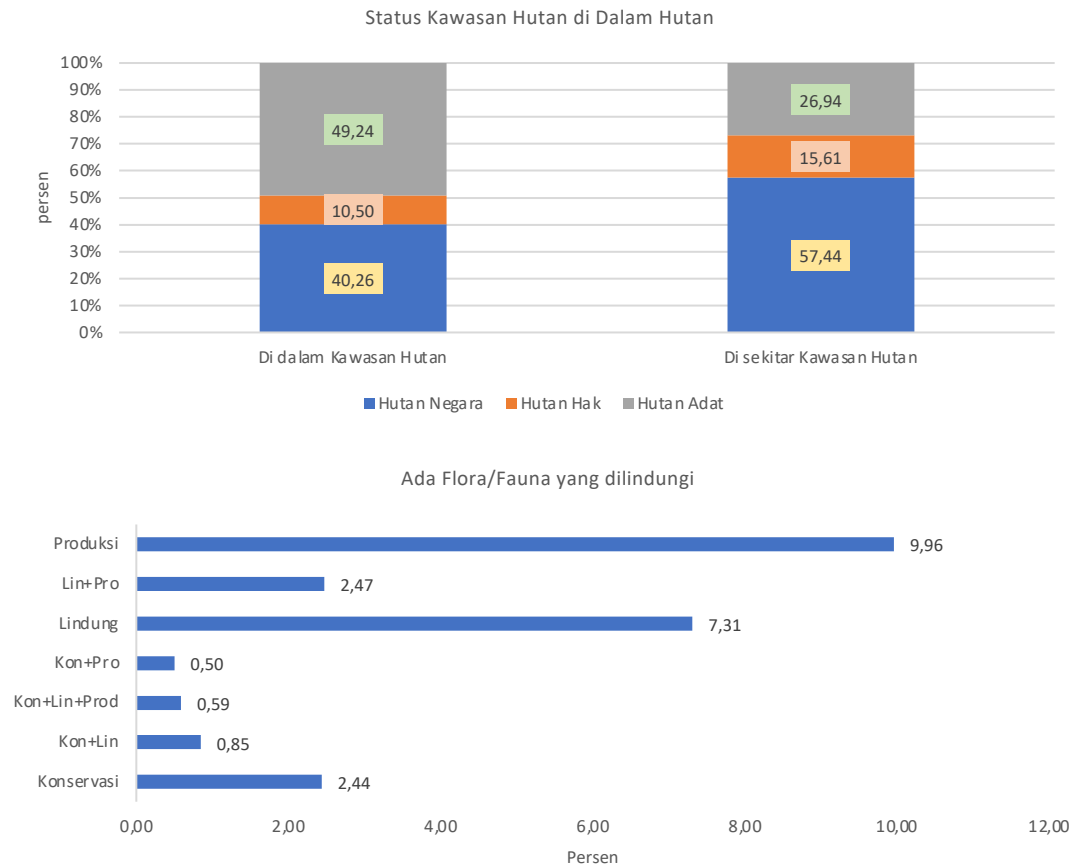


Sumber: Data Potensi Desa, Diolah, 2025

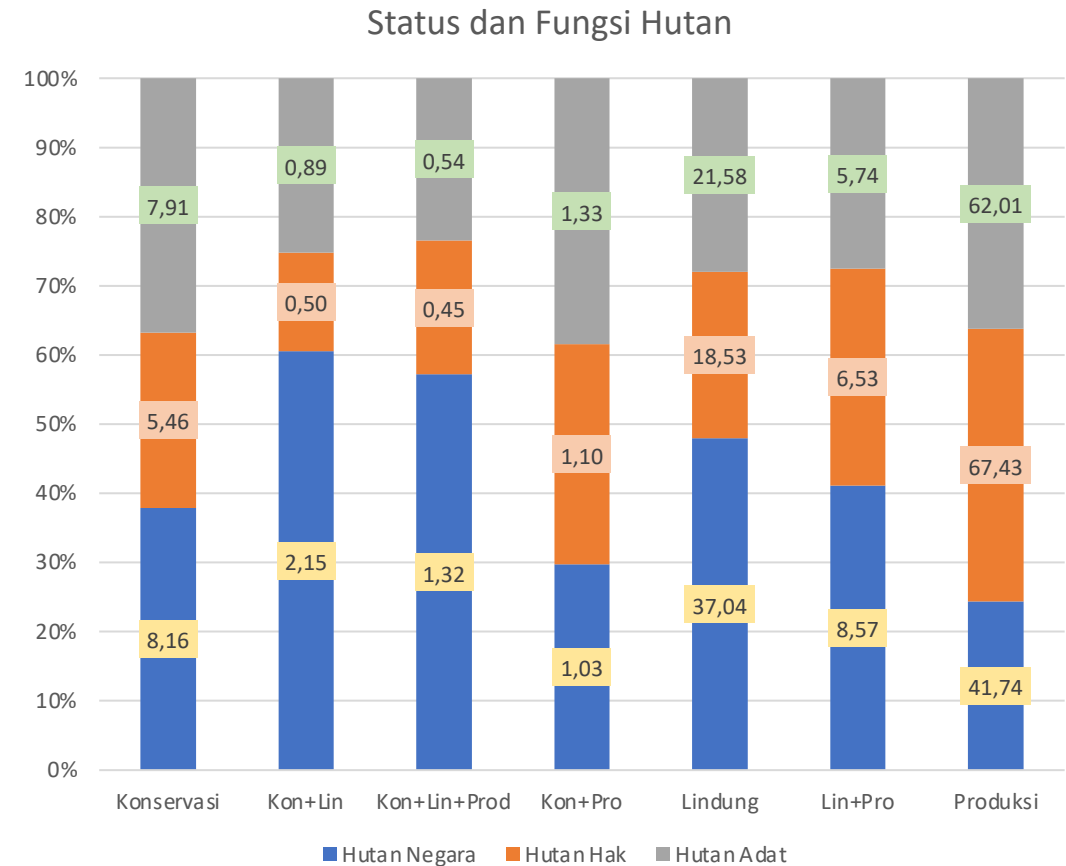
Desa dengan hutan adat, hanya 38 persen yang memiliki kawasan hutan

Sementara desa yang terletak di dalam hutan negara justru hanya 26,44 persen yang memiliki kawasan hutan

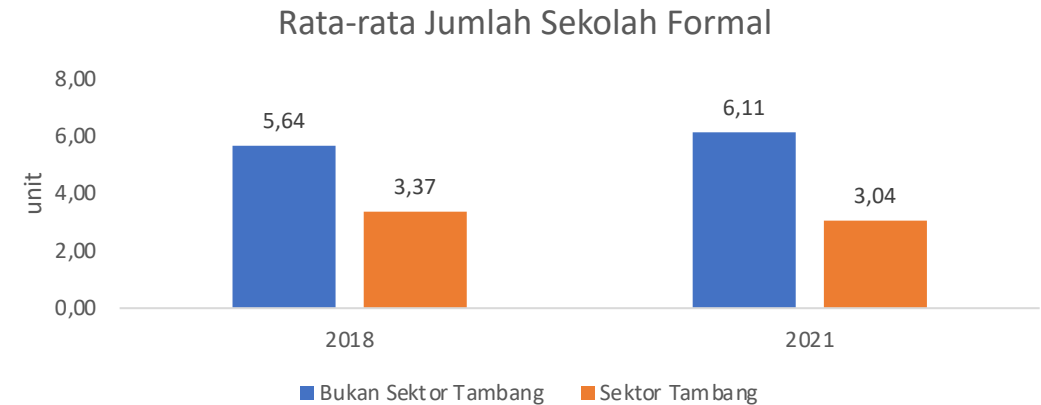
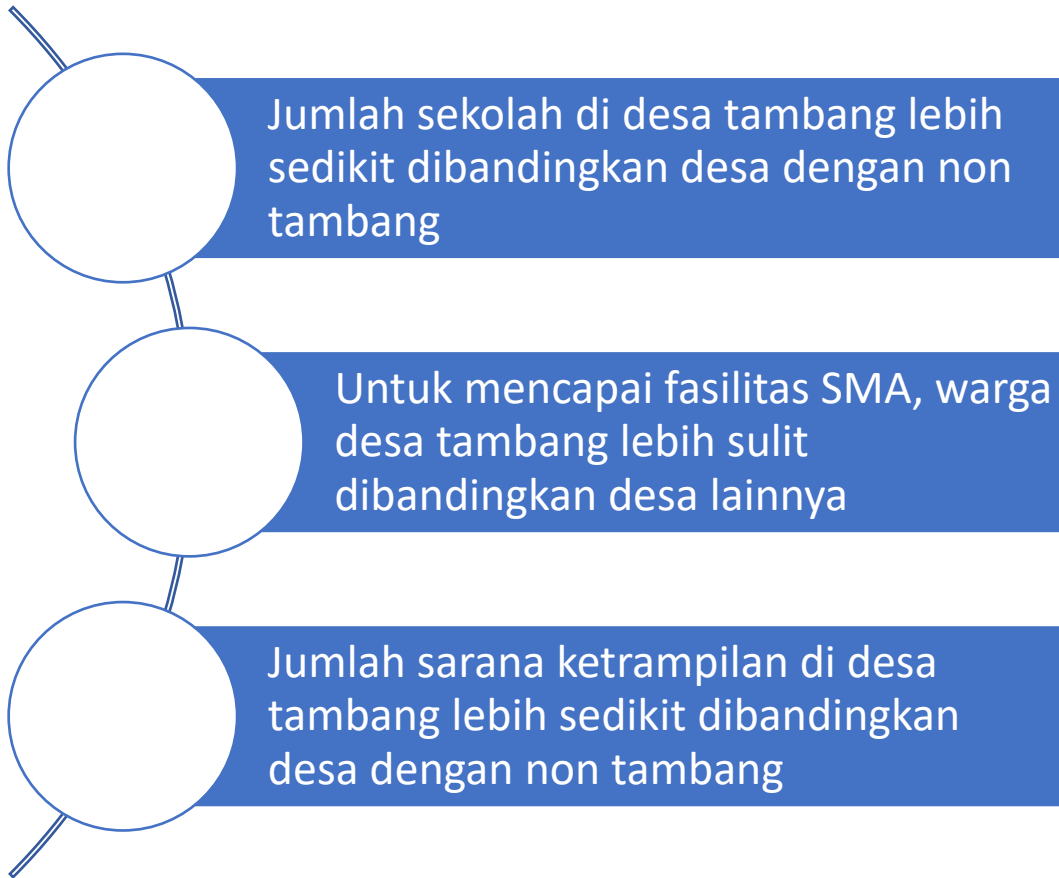
Profil Desa dalam Kawasan Hutan



Sumber: Data Potensi Desa, Diolah, 2025



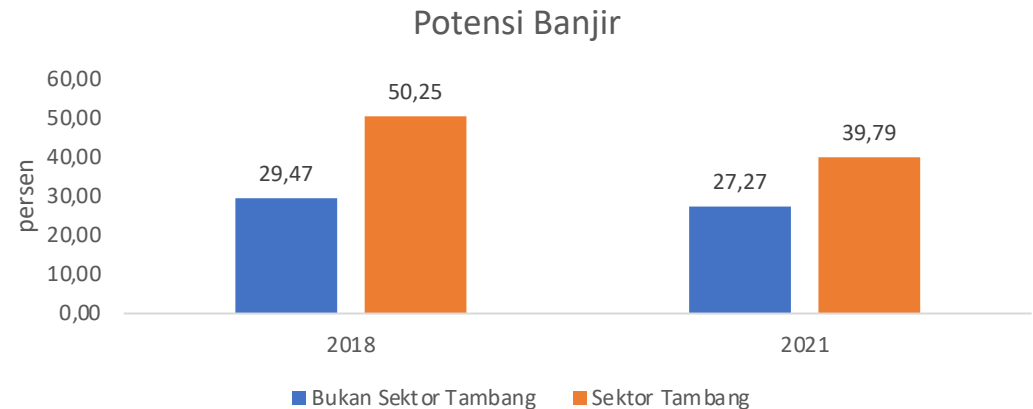
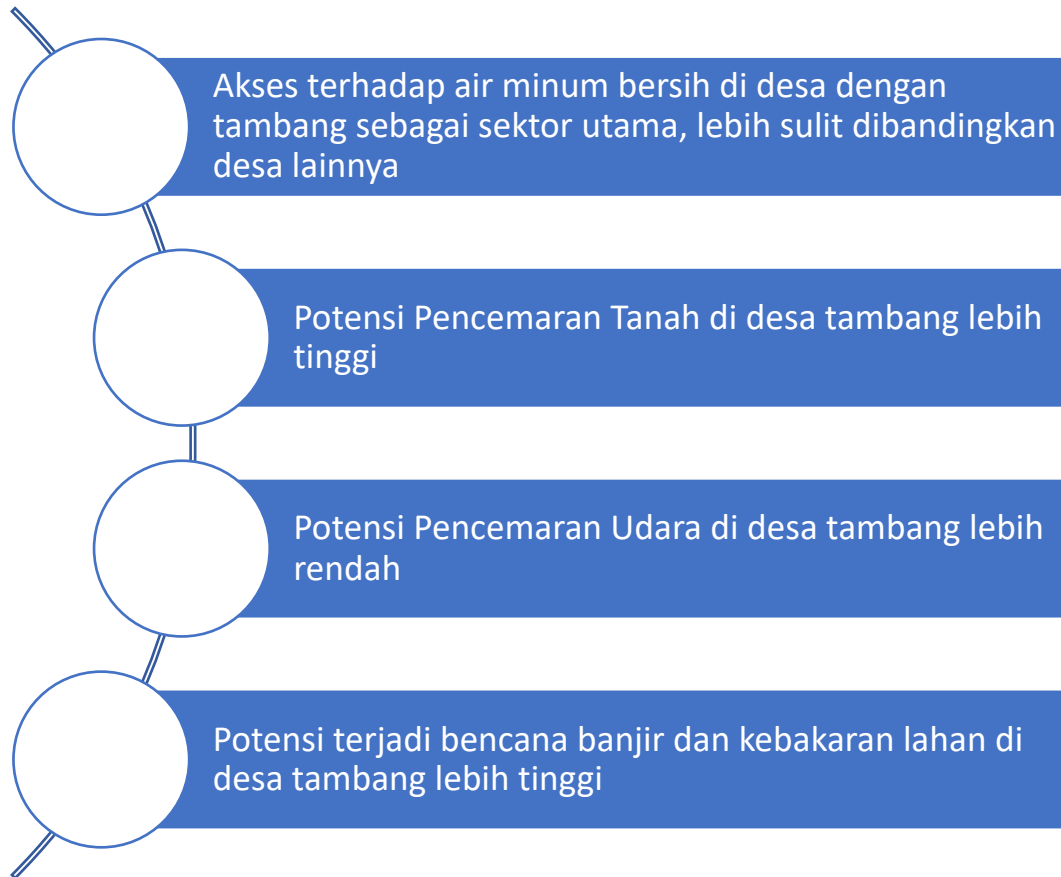
Desa dengan sektor tambang lebih sulit untuk mengakses pendidikan



Rata-rata jumlah sekolah formal di desa dengan pertambangan sebagai sektor utama, berkurang dari tahun 2018 ke 2021.

Berbanding terbalik dengan desa yang tidak mengandalkan sektor pertambangan sebagai sektor utamanya.

Desa dengan sektor tambang lebih berpotensi terjadi pencemaran lingkungan dan bencana



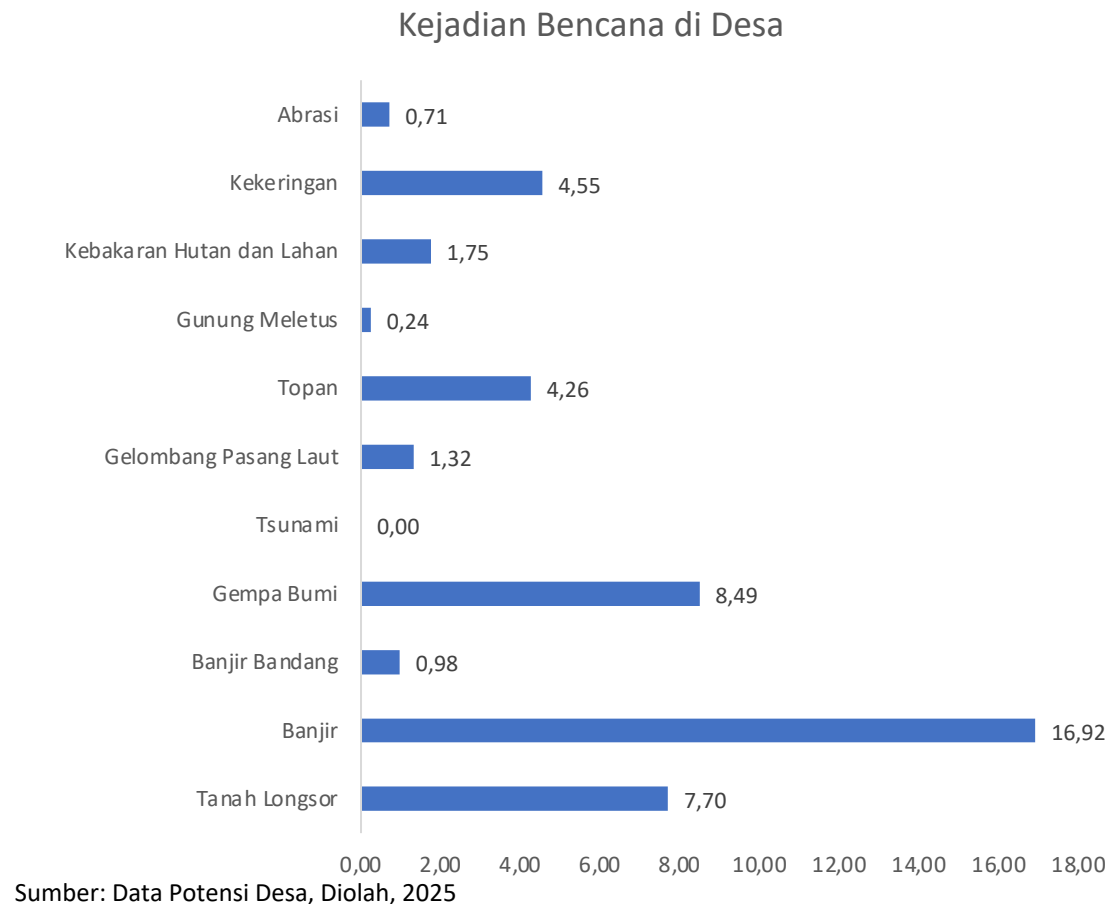
1 dari 2 desa dengan sektor pertambangan sebagai penghasil utama, mengalami banjir di tahun 2018.

Angka tersebut menurun pada tahun 2021 namun tidak signifikan.

Desa dengan sektor utama bukan pertambangan mempunyai potensi yang lebih kecil, meskipun masih cukup tinggi, yakni 1 dari 4 desa.

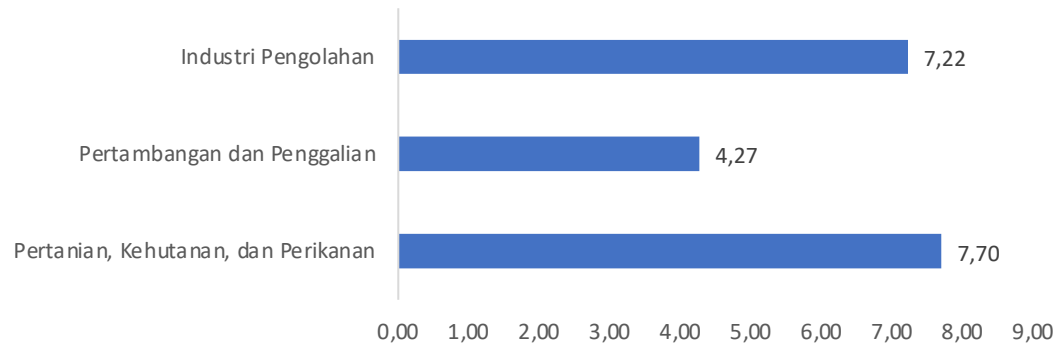
Bencana di Desa

- Bencana banjir merupakan ancaman nyata untuk desa-desa di Indonesia
- Terutama untuk desa yang mengandalkan pertambangan

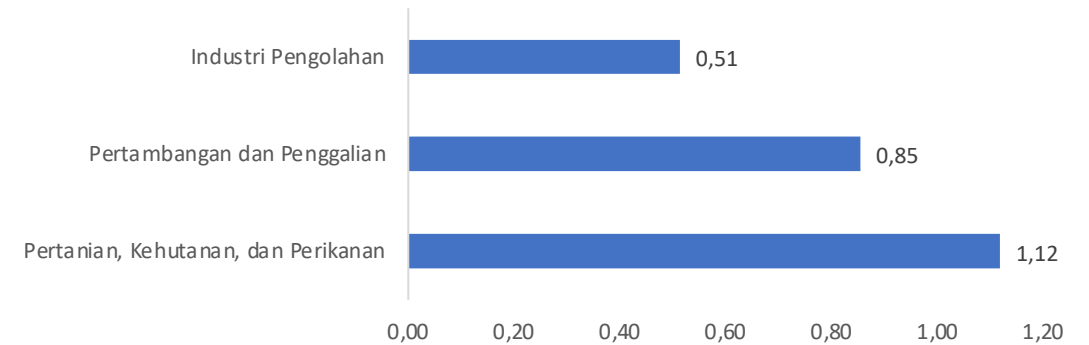


Bencana di Desa

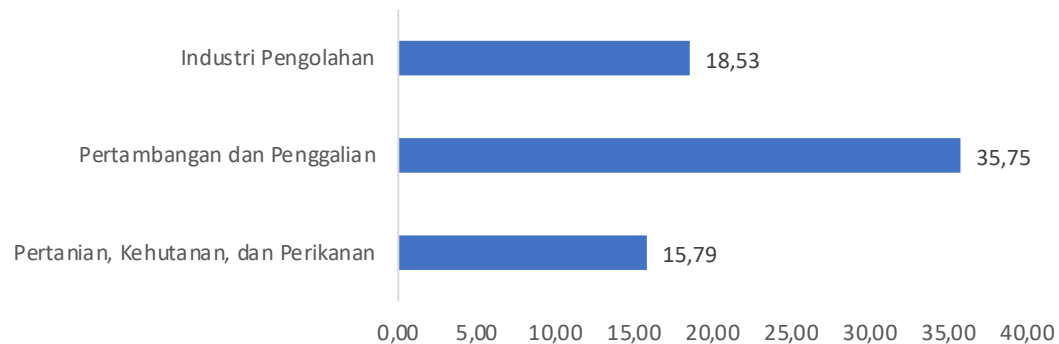
Kejadian Bencana Tanah Longsor di Desa



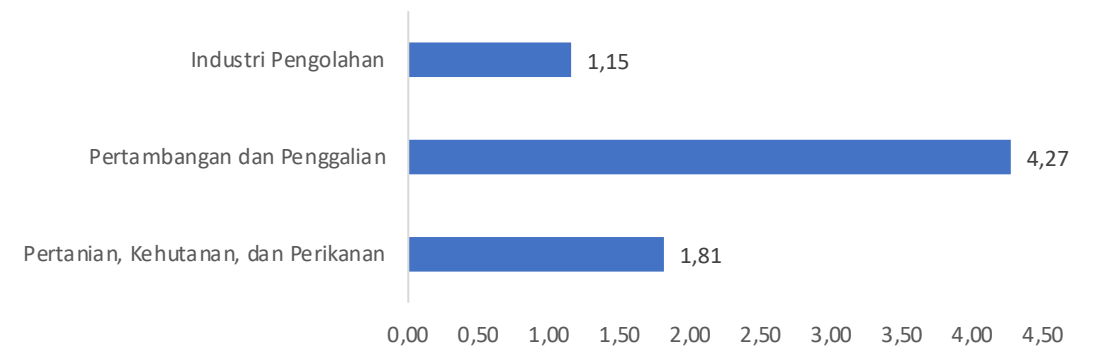
Kejadian Bencana Banjir Bandang di Desa



Kejadian Bencana Banjir di Desa

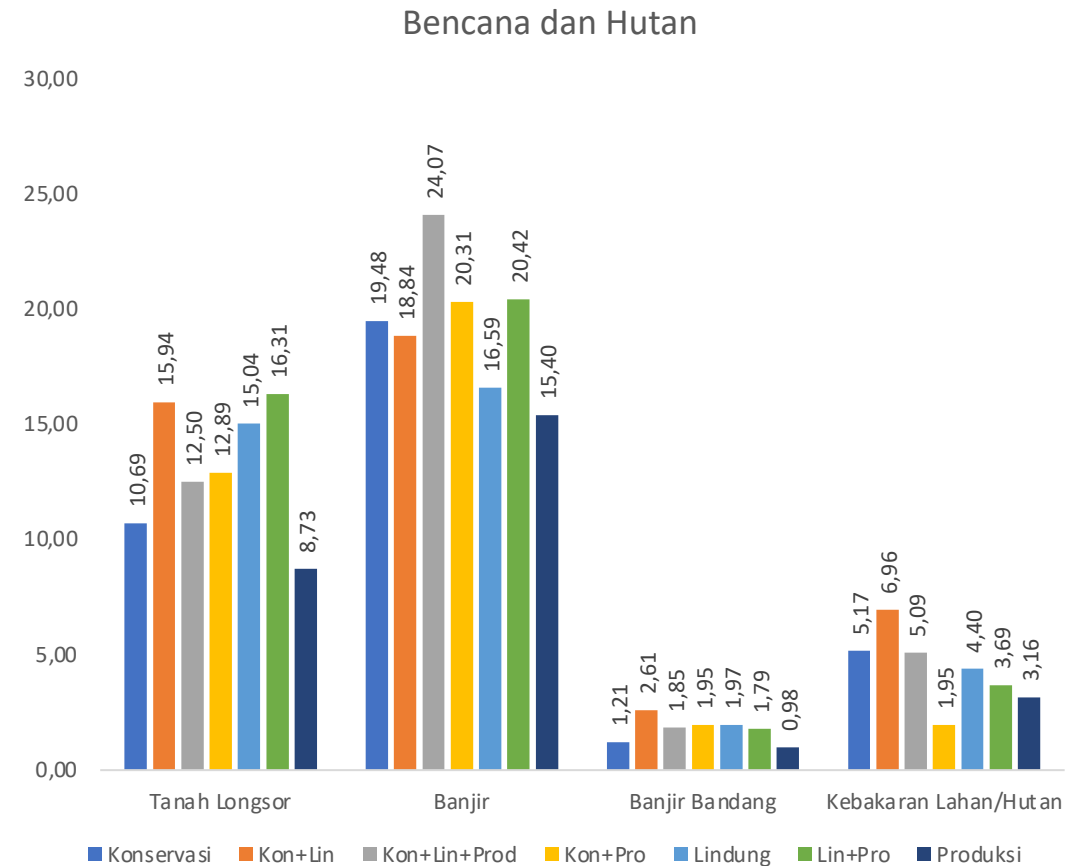
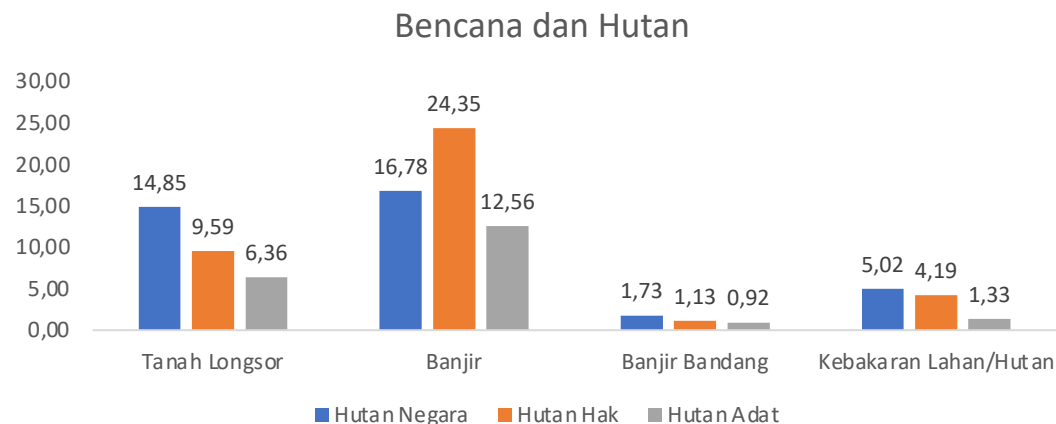
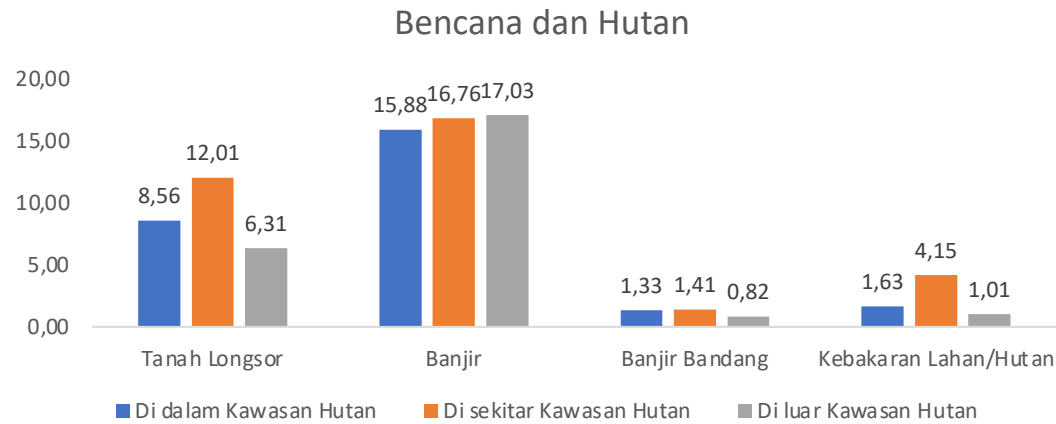


Kejadian Bencana Kebakaran Lahan/Hutan di Desa



Sumber: Data Potensi Desa, Diolah, 2025

Desa dengan sektor tambang lebih berpotensi terjadi pencemaran lingkungan dan bencana



Provinsi	Dampak PDB (Rp Triliun)	Persentase Perubahan (persen)
11. Aceh	(2.04)	-0.88
12. Sumatera Utara	(2.07)	-0.18
13. Sumatera Barat	(2.01)	-0.62
14. Riau	(2.08)	-0.21
15. Jambi	(2.08)	-0.83
16. Sumatera Selatan	(2.08)	-0.27
17. Bengkulu	(1.99)	-2.09
18. Lampung	(2.07)	-0.44
19. Kep. Bangka Belitung	(2.01)	-1.84
21. Kep. Riau	(2.07)	-0.52
31. DKI Jakarta	(1.88)	-0.05
32. Jawa Barat	(2.07)	-0.06
33. Jawa Tengah	(2.06)	-0.10
34. DI Yogyakarta	(2.00)	-0.90
35. Jawa Timur	(2.07)	-0.06
36. Banten	(2.08)	-0.17
51. Bali	(1.95)	-0.56
52. Nusa Tenggara Barat	(1.98)	-0.95
53. Nusa Tenggara Timur	(1.99)	-1.33
61. Kalimantan Barat	(2.00)	-0.80
62. Kalimantan Tengah	(2.04)	-0.88
63. Kalimantan Selatan	(2.01)	-0.69
64. Kalimantan Timur	(2.05)	-0.22
65. Kalimantan Utara	(2.01)	-1.93
71. Sulawesi Utara	(2.02)	-1.07
72. Sulawesi Tengah	(2.06)	-1.02
73. Sulawesi Selatan	(2.04)	-0.31
74. Sulawesi Tenggara	(1.98)	-1.41
75. Gorontalo	(1.98)	-3.95
76. Sulawesi Barat	(1.94)	-3.56
81. Maluku	(2.02)	-2.72
82. Maluku Utara	(1.98)	-3.59
91. Papua Barat	(2.03)	-1.64
94. Papua	(1.95)	-0.80
Nasional	(68.67)	-0.29

Dampak Bencana Banjir terhadap Ekonomi Regional dan Nasional

- Ketika satu daerah terjadi bencana hingga memutuskan transportasi, dampak bukan hanya di provinsi tersebut, namun secara nasional juga mengalami dampak negatif
- Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29 persen
- Secara nasional, dampak kepada provinsi lainnya terdapat pada arus barang konsumsi maupun kebutuhan industri yang juga melemah, terlebih Sumatera Utara merupakan salah satu simpul industri nasional dan pulau Sumatera
- Secara regional, ekonomi Aceh akan menyusut sekitar 0,88 persen atau setara Rp2,04 triliun

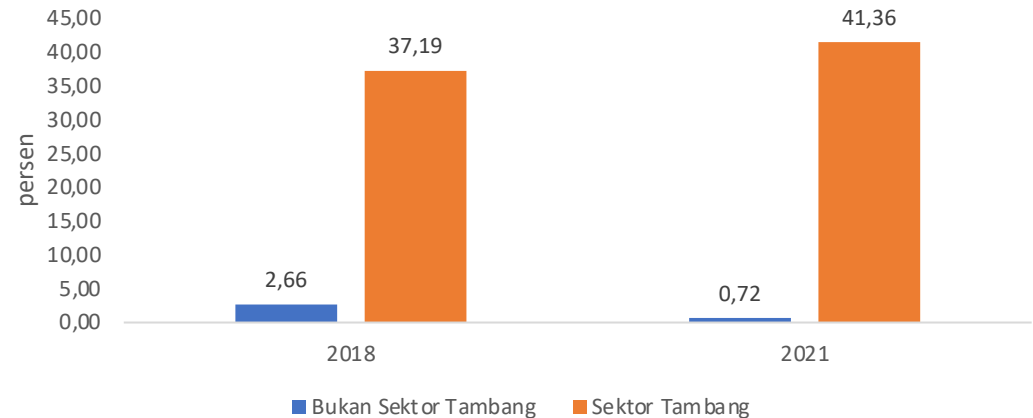
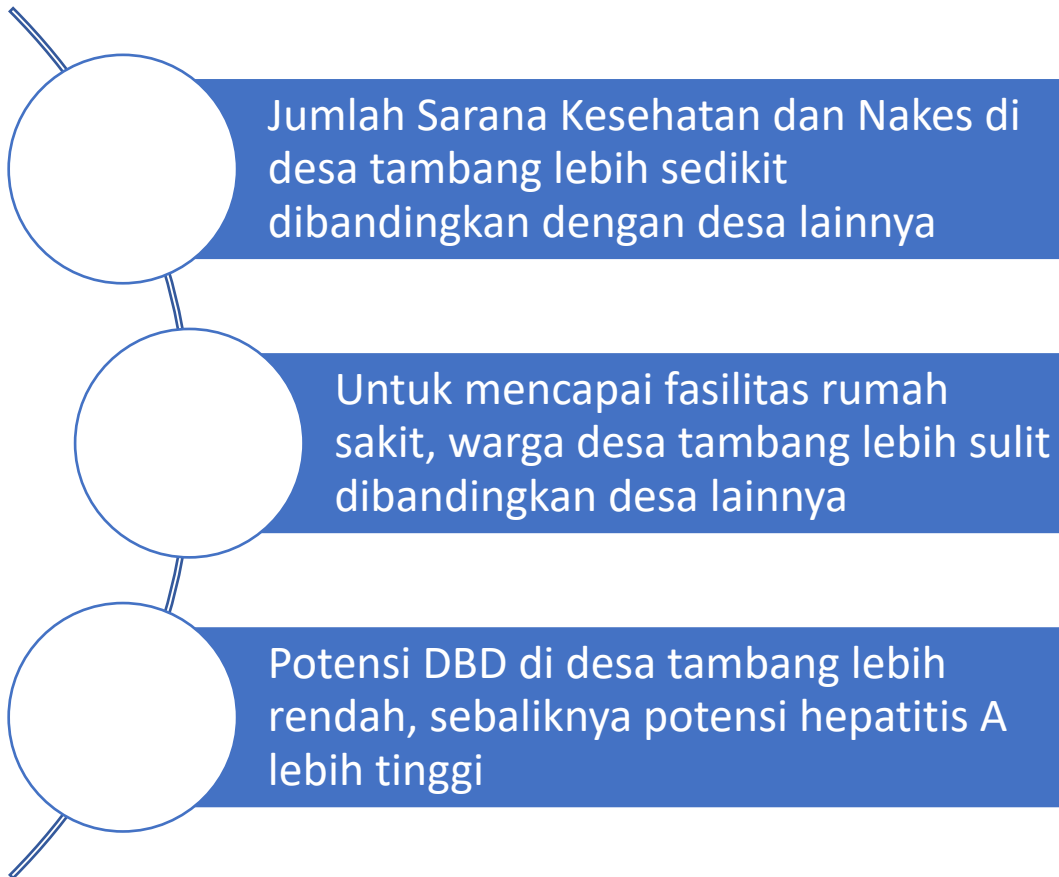
Sumber: Modelling CELIOS

Sekali Banjir, Tambang dan Sawit Tak Ada Artinya bagi Rakyat ACEH

- Kerugian ekonomi nasional Rp68,6 triliun lebih besar dibanding sumbangan penerimaan PHT (Penjualan Hasil Tambang) Rp16,6 triliun per Oktober 2025
- Aceh merugi Rp2,04 triliun, lebih besar dibanding PNPB tambang Aceh Rp929 miliar hingga 31 Agustus 2025.
- Sumbangan DBH (Dana Bagi Hasil) Perkebunan Sawit Provinsi Aceh Rp12 miliar di 2025 dan Minerba Rp56,3 miliar, jauh lebih kecil dibanding kerugian Rp2,04 triliun akibat banjir

Sumber: Kementerian Keuangan, APBN Kita November 2025, DJPK Kemenkeu Dana Transfer Daerah 2025

Desa dengan sektor tambang lebih sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan

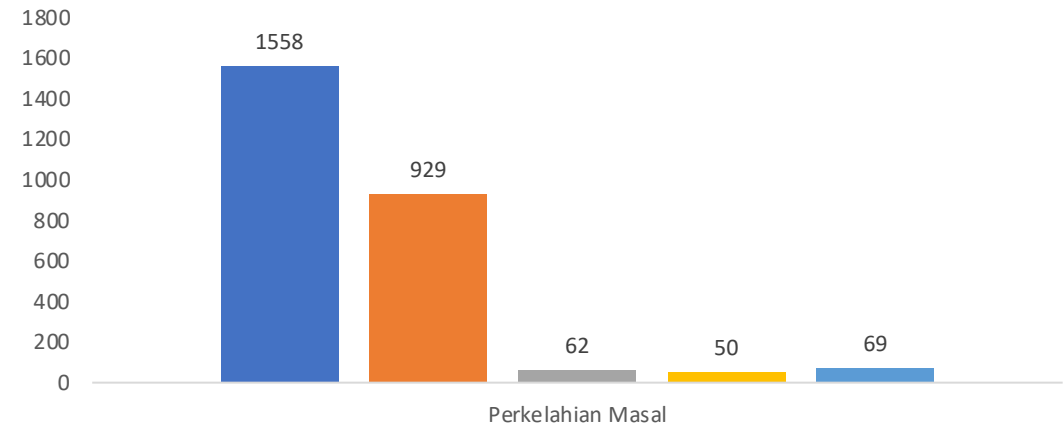
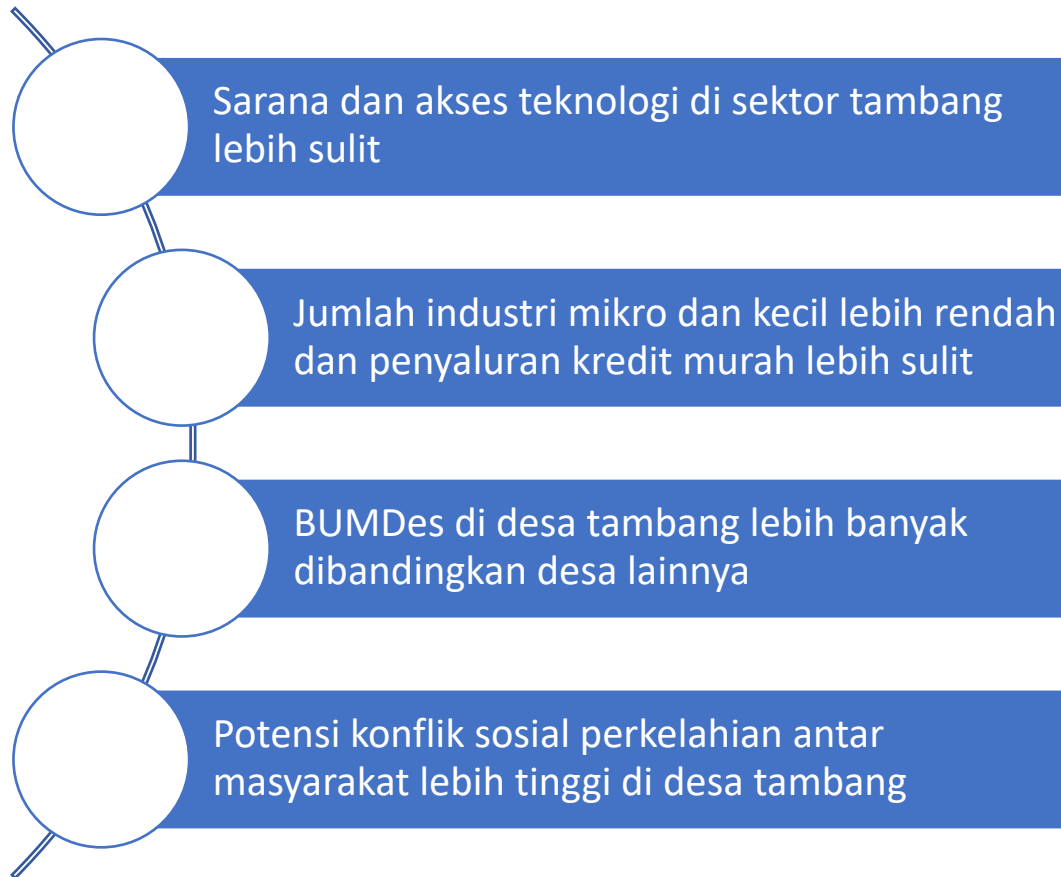


Pada desa dengan tambang sebagai mata pencaharian utama, akses terhadap rumah sakit semakin susah.

Pada 2018, terdapat 37,19% desa dengan sektor utama adalah sektor tambang mengaku sulit menuju RS terdekat, meningkat menjadi 41,36% di tahun 2021.

Artinya, akses infrastruktur menuju ke RS semakin rusak akibat aktivitas pertambangan di desa dan kawasan desa tersebut.

Desa dengan sektor tambang lebih sulit untuk mengakses teknologi dan ekonomi, serta berpotensi konflik horizontal

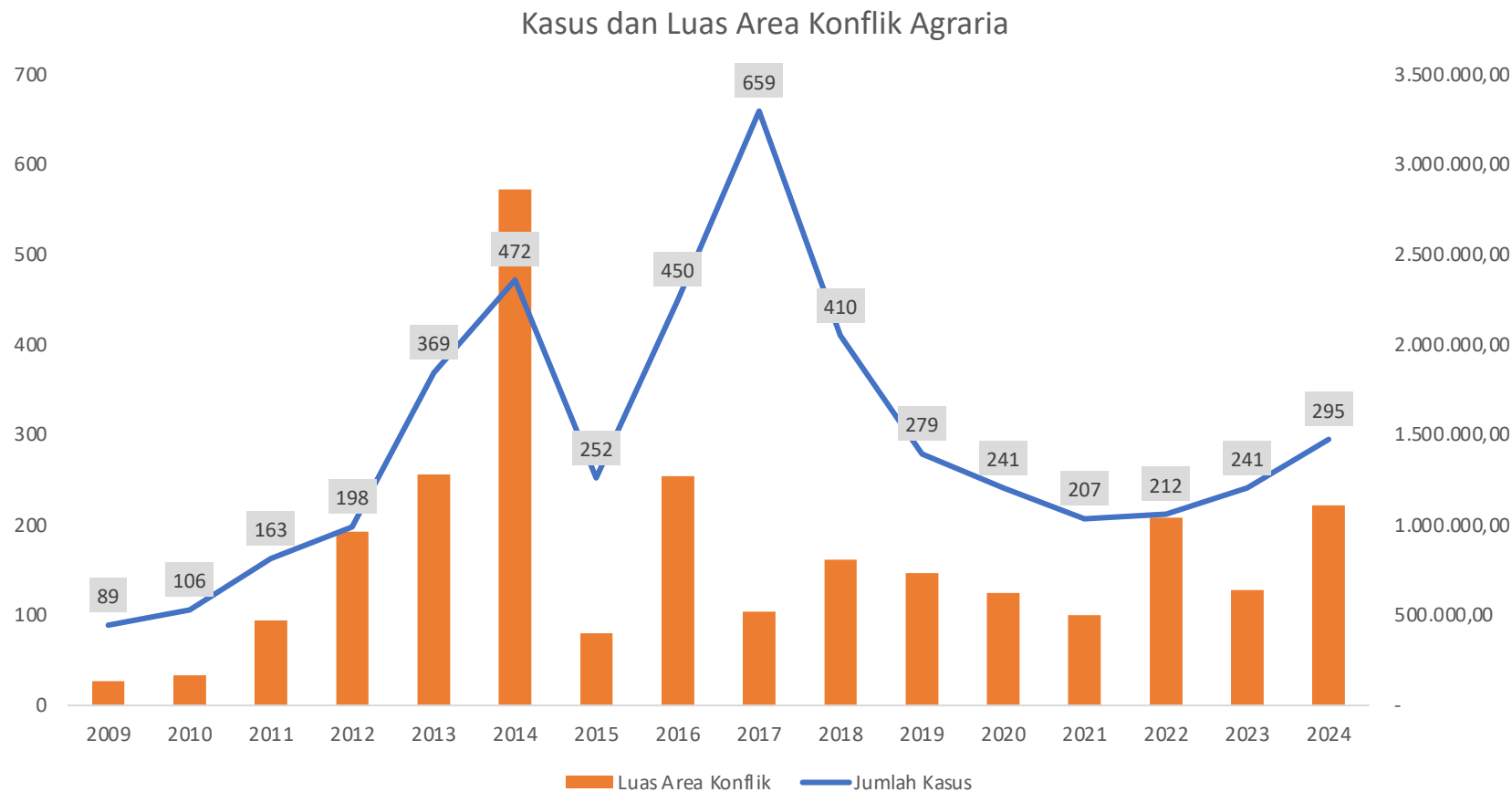


Desa yang tidak berfokus pada sektor tambang memiliki jumlah IKM yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa yang sektor utamanya adalah pertambangan.

Meskipun ada peningkatan jumlah IKM di desa-desa tambang dari tahun 2018 ke 2021, perbedaan yang signifikan masih terlihat.

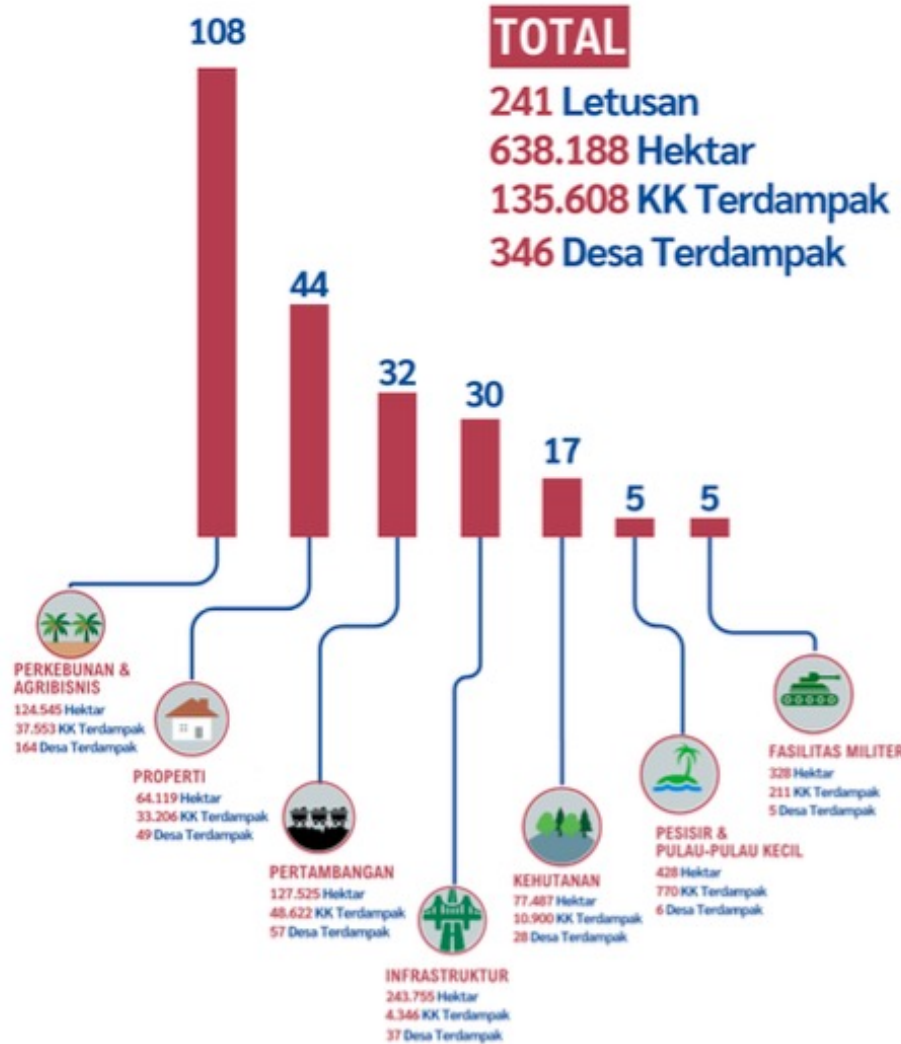
Angka ini menunjukkan bahwa desa yang bergantung pada sektor tambang memiliki perkembangan IKM yang lebih lambat dibandingkan desa yang fokus pada sektor lain, yang mungkin disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam dan kurangnya diversifikasi ekonomi.

Konflik Agraria Selalu Naik

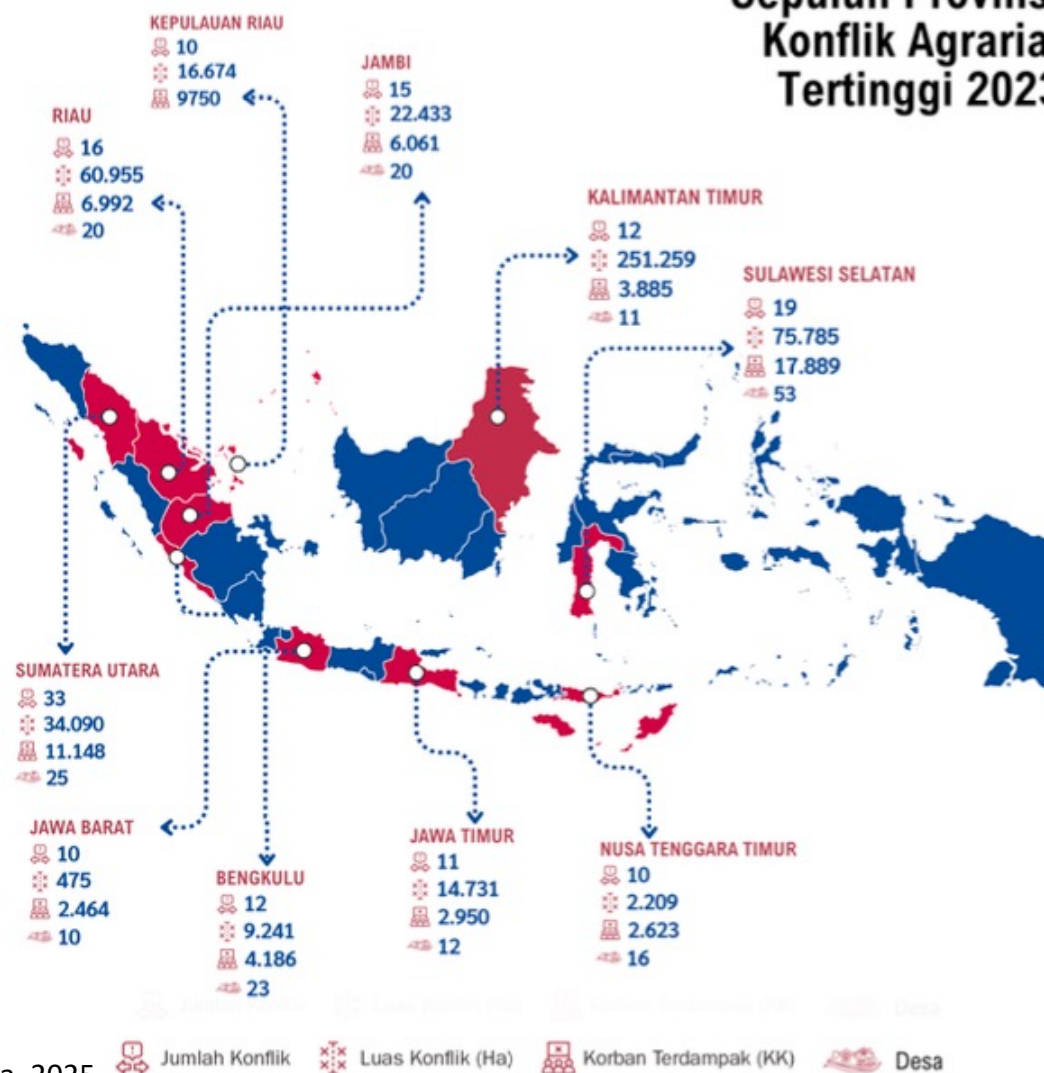


Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2025

- Data Kementerian ATR/BPN, merupakan salah satu kasus pertanahan yang paling banyak terjadi.
- Hingga tahun 2024 tercatat ada 11.083 sengketa, 506 konflik, dan 24.120 perkara tanah di seluruh Indonesia, namun hanya 46,88 persen yang berhasil diselesaikan.
- 2024: 295 kasus konflik agraria, 1,1 juta ha, ±67.400 KK terdampak
- Sektor dominan: perkebunan, infrastruktur, kehutanan, tambang



Sepuluh Provinsi Konflik Agraria Tertinggi 2023



Gambar 2. Letusan konflik agraria per-sektor pada tahun 2023. Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2025

Konflik Agraria Mendatangkan Kerugian

- Kasus Gunung Mas, Kalteng: ± 400 ha $\rightarrow$ kerugian negara Rp 189 miliar
- Konflik SDA 2018: 410 kasus, 807 ribu ha, 87 ribu KK terdampak
- Kerugian perusahaan (contoh sawit): 51–88% biaya operasional / 102–177% biaya investasi per tahun
- Kerugian masyarakat: KK pemilik kebun sawit $\pm$ Rp 51,6 juta/tahun; non-pemilik $\pm$ Rp 32,3 juta/tahun
- Dampak non-finansial: hilangnya produktivitas, biaya hukum, kerusakan lingkungan, turunnya investasi lokal

Rekomendasi Kebijakan (Lanjutan)

Pengalihan fokus investasi dari sektor ekstraktif ke sektor berkelanjutan

01 Mewajibkan prioritas belanja pemerintah kepada sektor yang berkaitan dengan ekonomi restoratif

Stakeholder: *Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan*

02 Mengalihkan subsidi dan insentif fiskal sektor pertambangan ke sektor perkebunan berkelanjutan, perikanan, dan energi terbarukan

Stakeholder: *Kementerian Keuangan*

03 Membuat dan mengimplementasikan Green Investment Taxonomy Indonesia yang melarang pembiayaan perbankan BUMN untuk proyek dengan biaya kerusakan lingkungan melebihi threshold tertentu

Stakeholder: *Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Danantara, Bank Himbara, Otoritas Jasa Keuangan*

Pembuatan kebijakan publik wajib melalui proses Regulatory Impact Assessment yang memperhitungkan juga biaya sosial, ekonomi, dan ekologis

01 Mewajibkan full cost accounting (termasuk biaya kerusakan lingkungan) dalam setiap RIA untuk regulasi sektor ekstraktif

Stakeholder: *Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, BNPB, Kementerian Investasi*

02 Mengembangkan metodologi standar perhitungan biaya kerusakan lingkungan bersama BPS, BRIN, dan lembaga riset independen

Stakeholder: *Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Badan Pusat Statistik, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian*

03 Menerbitkan laporan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tahunan yang komprehensif dan dipublikasikan secara terbuka

Stakeholder: *Kementerian ESDM*

Rekomendasi Kebijakan

Internalisasi Biaya Kerusakan Lingkungan dalam kebijakan fiskal

01 Mewajibkan biaya kerusakan lingkungan dalam penghitungan pembangunan baru yang bersinggungan dengan lingkungan

Stakeholder: *Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, BNPB, Perusahaan*

02 Mereformulasi dana bagi hasil sumber daya alam berbasis biaya kerusakan lingkungan dan potensi bencana

Stakeholder: *Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Nasional*

03 Membentuk dana kompensasi ekologis di daerah yang didanai oleh perusahaan tambang yang berdasarkan biaya kerusakan lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung

Stakeholder: *Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah*

Integrasi kajian risiko berbasis ilmiah sebagai prasyarat perizinan

01 Mewajibkan lampiran peta risiko bencana dari BNPB/BMKG sebagai dokumen persyaratan

Stakeholder: *Kementerian ESDM, BNPB, Kementerian Investasi, Pemerintah Daerah*

02 Membentuk Tim Teknis Lintas Kementerian (ESDM-LHK-ATR/BPN-BNPB-BMKG) untuk verifikasi kajian risiko dalam perizinan

Stakeholder: *Kementerian ESDM, BNPB, Kementerian Investasi, Pemerintah Daerah*

Terima Kasih

nailul.huda@celios.co.id



nailul30



nailul_huda



+62 857 4223 2974

